



BAPPEL X TBANG
KABUPATEN TAPIN



RAD-PUG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER (RAD-PUG) KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024–2026 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan sebagai kerangka acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi bersama mewujudkan Kabupaten Tapin untuk mengembangkan PUG secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran pemerintah sehingga terwujudnya Kabupaten Tapin yang mampu membangun kota, merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunan, dan berorientasi pada pengarustamaan gender.

Dengan tersusunnya dokumen RAD ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Tapin untuk lebih meningkatkan peran aktif dan mempertahankan kinerja terbaiknya sehingga terwujudnya integrasi gender dalam program pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam memfasilitasi kami dalam upaya pengumpulan informasi dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan selesainya penyusunan laporan ini. Harapan kami agar laporan ini dapat memberikan gambaran hasil kinerja dan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur pada pemerintahan Kabupaten Tapin di masa mendatang.

Rantau,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TAPIN.....	7
2.2. Aspek Geografi.....	7
2.3. Aspek Demografi.....	8
2.4. Indeks Pembangunan Manusia.....	10
2.5. Indeks Pembangunan Gender.....	13
2.6. Indeks Pemberdayaan Gender.....	14
2.7. Indeks Ketimpangan Gender.....	16
BAB III CAPAIAN DAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TAPIN.....	18
3.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.....	18
3.2. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Perencanaan Pembangunan.....	27
3.3. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.....	38
3.4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.....	81
3.5. Pelaporan.....	86
3.6. Inovasi.....	86
BAB IV RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER.....	88
BAB V PENUTUP.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kecamatan di Kabupaten Tapin.....	8
Tabel 2.2 Penduduk Kabupaten Tapin Berdasar Kecamatan Tahun 2023	10
Tabel 2.3 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin.....	11
Tabel 2.4 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Berdasarkan Gender.....	13
Tabel 3.1 Capaian PUG Kabupaten Tapin.....	18
Tabel 3.2 Target PUG Kabupaten Tapin	18
Tabel 3.3 Kebijakan Daerah Kabupaten Tapin terkait PUG	19
Tabel 3.4 SDM Perencana Terlatih PUG Kabupaten Tapin.....	19
Tabel 3.5 SDM Teknis Terlatih PUG Kabupaten Tapin	20
Tabel 3.6 Gender Champion Kabupaten Tapin	21
Tabel 3.7 Kelembagaan PUG Kabupaten Tapin	22
Tabel 3.8 Data SKPD Yang Menyampaikan Dokumen Anggaran Responsif Gender Tahun 2023.....	27
Tabel 3.9 Anggota DPRD di Kabupaten Tapin.....	39
Tabel 3.10 Kebijakan Daerah Kabupaten Tapin terkait Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	39
Tabel 3.11 Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tapin.....	40
Tabel 3.12 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tapin.....	41
Tabel 3.13 Data Peserta Didik Kabupaten Tapin.....	42
Tabel 3.14 Daftar Satuan Pendidikan dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Jenjang PAUD di Kabupaten Tapin	42
Tabel 3.15 Daftar Satuan Pendidikan dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Jenjang SD di Kabupaten Tapin.....	43
Tabel 3.16 Daftar Satuan Pendidikan dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Jenjang SMP di Kabupaten Tapin.	44
Tabel 3.17 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapin	45
Tabel 3.18 Data Prevalensi Stunting Kabupaten Tapin	46
Tabel 3.19 Capaian Indikator Bidang Urusan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin...	47
Tabel 3.20 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja.....	48
Tabel 3.21 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Kabupaten Tapin	49
Tabel 3.22 Implementasi PUG dalam Bidang Hukum	49

Tabel 3.23 Implementasi PUG dalam Bidang Politik	51
Tabel 3.24 Implementasi PUG dalam Bidang Sosial.....	52
Tabel 3.25 Implementasi PUG dalam Bidang Ekonomi.....	58
Tabel 3.26 Implementasi PUG dalam Bidang Lainnya.....	59
Tabel 3.27 Fasilitas Umum Responsif Gender	60
Tabel 3.28 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Tapin	63
Tabel 3.29 Tabel Jumlah Kasus Anak dan Perempuan yang Dilayani UPTD PPA Kabupaten Tapin	64
Tabel 3.30 Rencana Aksi TPK2D Kabupaten Tapin	64
Tabel 3.31 Jumlah Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Program Kampung Iklim	75
Tabel 3.32 Jumlah Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Program Kampung Keluarga Berkualitas.....	75
Tabel 3.33 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok pada Bina Keluarga Balita (BKB)	76
Tabel 3.34 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok pada Bina Keluarga Remaja (BKR) .	77
Tabel 3.35 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok pada Bina Keluarga Lansia (BKL)...	77
Tabel 3.36 Layanan PUSPAGA	79
Tabel 3.37 Rekapitulasi Pendampingan LK3 Ruhui Rahayu.....	80
Tabel 3.38 Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan	82
Tabel 3.39 Instrumen Pemantauan (<i>monitoring</i>) ARG Tahap Pelaksanaan.....	83
Tabel 3.40 Instrumen Pemantauan (<i>monitoring</i>) ARG Tahap Pertanggungjawaban	84
Tabel 3.41 Instrumen Evaluasi Anggaran Responsif Gender	85
Tabel 3.42 Klasifikasi Evaluasi	86
Tabel 3.43 Inovasi Kabupaten Tapin terkait Penyelenggaraan PUG.....	86
Tabel 4.1 Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Tapin.....	7
---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Piramida Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2023.....	9
Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia.....	11
Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Berdasarkan Gender	12
Grafik 2.4 Indeks Pembangunan Gender	13
Grafik 2.5 Indeks Pemberdayaan Gender	14
Grafik 2.6 Keterlibatan di Parlemen Kabupaten Tapin	15
Grafik 2.7 Tenaga Profesional Kabupaten Tapin.....	16
Grafik 2.8 Sumbangan Pendapatan Kerja Kabupaten Tapin.....	16
Grafik 2.9 Indeks Ketimpangan Gender	17
Grafik 3.1 Anggaran Responsif Gender Kabupaten Tapin.....	38
Grafik 3.2 Jumlah SKPD yang Mempunyai Anggaran Responsif Gender	38
Grafik 3.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin	45
Grafik 3.4 Prevalensi Stunting Kabupaten Tapin Berdasarkan SSGI/SKI Kementerian Kesehatan	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan” yang artinya bahwa negara mengafirmasi tentang kesetaraan di antara warga negara tanpa memandang gender. Kesetaraan gender merupakan prinsip yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan organisasi. Di bidang pendidikan, kesetaraan gender berarti memberikan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan bagi semua lembaga Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat menyusun kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing bidang pembangunan, Secara spesifik diamanahkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Semua upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender.

Pemerintah Kabupaten Tapin memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (baik laki-laki atau perempuan) untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses seluruh hasil kegiatan pembangunan daerah melalui konsep pengarusutamaan gender (PUG) yang menjamin kesetaraan dan kesamaan hak seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi

seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender.

Guna mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan terutama sekali berkaitan dengan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari hasil pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin serta percepatan penerapan Konsep Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah, diperlukan suatu Rencana Aksi Daerah (RAD) yang memuat tentang indikator-indikator, rencana aksi, dan OPD penanggung jawab pelaksanaan rencana aksi daerah yang merupakan bagian dari proses Perencanaan Responsif Gender yang didefinisikan sebagai perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek, yaitu peran, akses, manfaat, dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya rencana aksi daerah dimaksud, diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif untuk mewujudkan Keadilan Gender sehingga terwujudnya suatu perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, dan hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, akses perbankan, dan lain-lain).

Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Bappedalitbang Kabupaten Tapin memandang perlu untuk melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026. Kegiatan ini dinilai cukup penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapin. Selanjutnya dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 diharapkan dapat memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender di mana terdapat perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender sehingga terwujudnya kesamaan kondisi

dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melakukan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang Pembangunan di Daerah dan mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yaitu bahwa seluruh Departemen maupun Lembaga-Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya (termasuk pemerintah daerah yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah) harus memberikan dukungan dan melaksanakan program pengarusutamaan gender, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 07);
13. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/196/KUM/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin;
14. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tim Teknis Analisis Anggaran Responsif Gender Kabupaten Tapin.

1.3. Maksud dan Tujuan

2.1.1. Maksud

Pelaksanaan kegiatan ini bermaksud untuk melakukan penyusunan dokumen kajian Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

2.1.2. Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen kajian Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yaitu untuk:

- a. Menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara lebih konkrit dan terarah pada setiap aspek pembangunan guna terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
- b. Memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun Peraturan Bupati terkait Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG).
- c. Menggambarkan analisis situasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Tapin;

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Tapin

- 2.1. Aspek Geografi
- 2.2. Aspek Demografi
- 2.3. Indeks Pembangunan Manusia
- 2.4. Indeks Pembangunan Gender
- 2.5. Indeks Pemberdayaan Gender
- 2.6. Indeks Ketimpangan Gender

BAB III Capaian dan Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tapin

- 3.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

- 3.2. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Perencanaan Penganggaran
- 3.3. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- 3.4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- 3.5. Pelaporan
- 3.6. Inovasi

BAB IV Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

BAB V Penutup

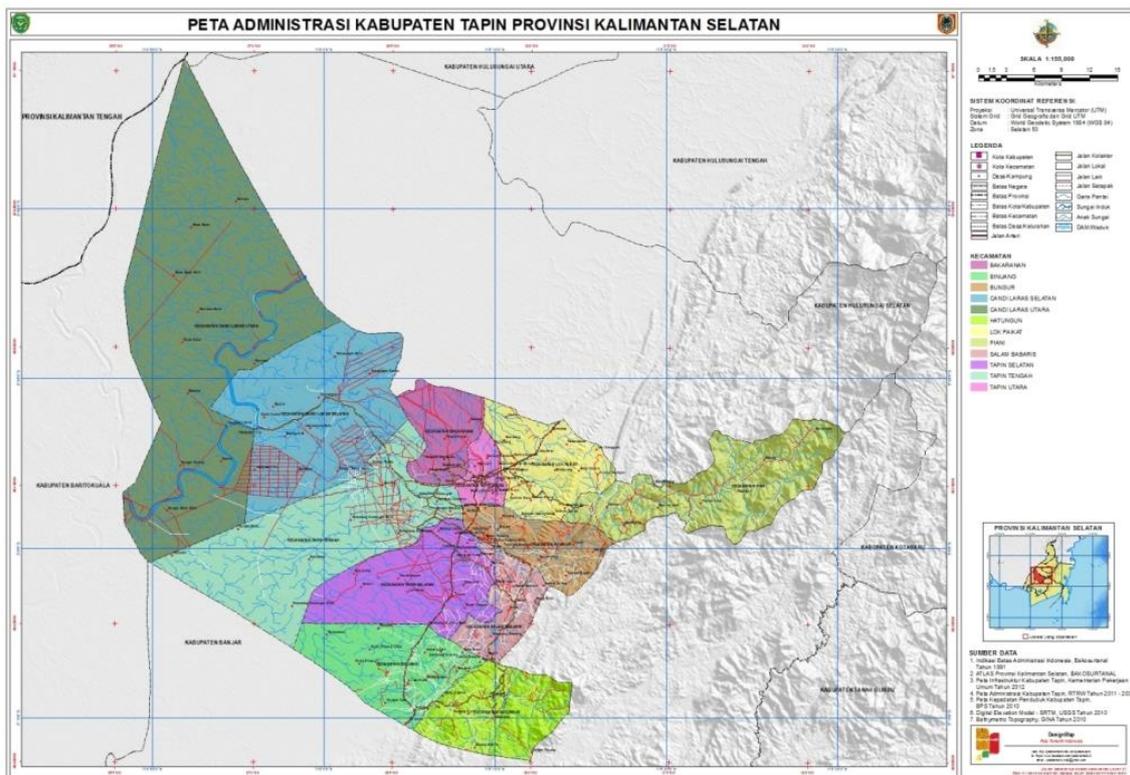
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TAPIN

2.2. Aspek Geografi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Kabupaten Tapin terletak di antara 20.32'.43"–30.00'.43" Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13"– 1150.30'.33" Bujur Timur dan mempunyai luas wilayah 2.174,95 km² yang merupakan 5,8% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sebelah Utara dan Timur, Kabupaten Tapin berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Adapun pada sebelah Barat, Kabupaten Tapin berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Tapin



Sumber gambar: Bappelitbang Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data Kecamatan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kecamatan di Kabupaten Tapin

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Bakarangan	62,57
2	Binuang	132,39
3	Bungur	91,26
4	Candi Laras Selatan	249,61
5	Candi Laras Utara	681,40
6	Hatungun	95,60
7	Lokpaikat	93,89
8	Piani	200,09
9	Salam Babaris	72,80
10	Tapin Selatan	153,44
11	Tapin Tengah	309,56
12	Tapin Utara	32,34
Kabupaten Tapin		2.174,95

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0–7 m yang meliputi 67,34% dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang, dan
- wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

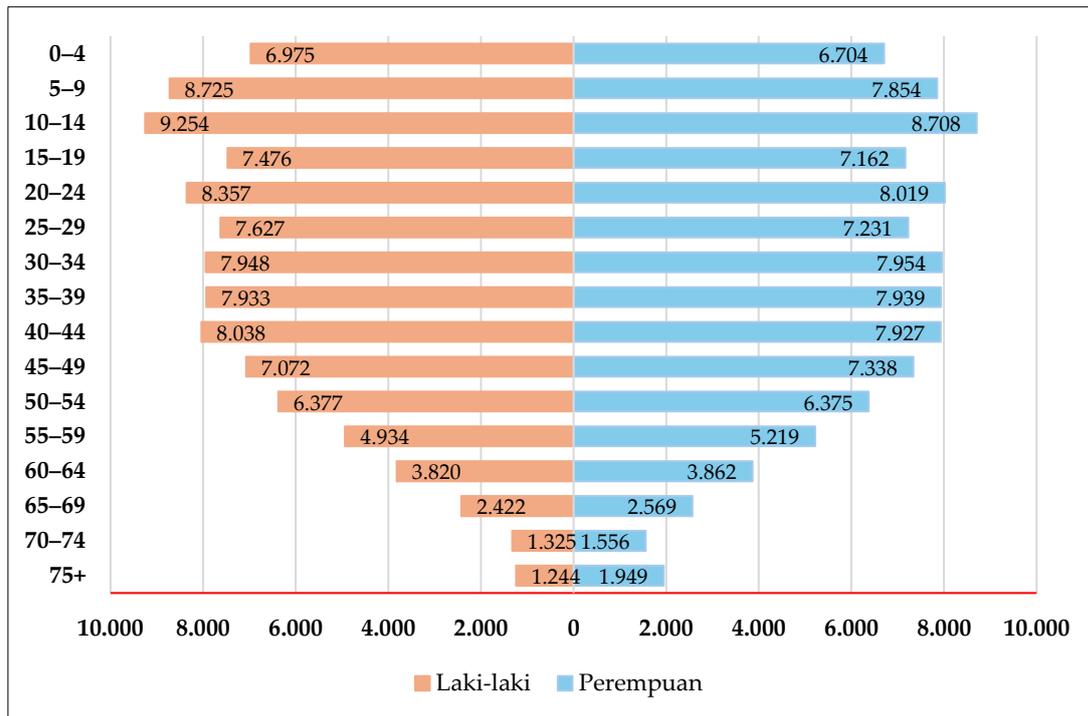
Topografi Kabupaten Tapin bervariasi, dengan bagian utara yang lebih datar dan bagian selatan yang lebih berbukit-bukit. Sungai Tapin dan Sungai Nagara menjadi arteri utama dalam hidrografi kabupaten ini, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai sumber daya ekonomi. Kabupaten ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan tertinggi pada November dan terendah pada Juli dengan curah hujan yang tercatat berkisar antara 137,4–395,4 mm. Potensi pertanian dan perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, dan pisang, sangat berkembang di daerah ini. Selain itu, Kabupaten Tapin juga memiliki potensi alam yang menarik untuk pengembangan pariwisata, terutama dalam bidang ekowisata.

2.3. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2023 berjumlah 197.893 jiwa, yang terdiri dari 99.527 laki-laki dan 98.366 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020–2023 sebesar 1,68%. Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan tahun 2023 sebesar 101.

Berdasarkan Grafik 2.1, penduduk Kabupaten Tapin yang berusia produktif (15–64 tahun) sebanyak 138.608 jiwa di mana hal ini menunjukkan bahwa masih lebih banyak penduduk yang berusia produktif dibandingkan penduduk yang berusia tidak produktif; 0–14 tahun sebesar 48.220 jiwa dan 65–75 tahun ke atas sebanyak 11.065 jiwa. Tingginya jumlah penduduk usia produktif merupakan modal yang baik bagi Kabupaten Tapin dalam pembangunan. Di samping itu, penduduk Kabupaten Tapin berjenis kelamin perempuan di usia produktif sebanyak 69.026 jiwa. Sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di usia produktif sebanyak 69.582 jiwa.

Grafik 2.1 Piramida Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2023



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tapin pada tahun 2023 berada pada Kecamatan Binuang dengan jumlah 32.536 jiwa. Adapun jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Piani dengan jumlah 6.334 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tapin tahun 2023 mencapai 91 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tapin Utara dengan kepadatan sebesar 806 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Candi Laras Utara sebesar 25 jiwa/km².

Rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Kabupaten Tapin tahun 2023 sebesar 101, di mana rasio tertinggi ada pada Kecamatan Salam Babaris (107) dan terendah ada pada Kecamatan Binuang (98).

Tabel 2.2 Penduduk Kabupaten Tapin Berdasar Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Penduduk (%)	Kepadatan/km ²	Rasio Jenis Kelamin
1	Bakarangan	10.978 (5,55)	175	102
2	Binuang	32.536 (16,44)	246	98
3	Bungur	14.404 (7,28)	158	99
4	Candi Laras Selatan	12.608 (6,37)	51	103
5	Candi Laras Utara	17.283 (8,73)	25	106
6	Hatungun	9.912 (5,01)	104	100
7	Lokpaikat	12.396 (6,26)	132	99
8	Piani	6.334 (3,20)	32	105
9	Salam Babaris	12.583 (6,36)	173	107
10	Tapin Selatan	21.282 (10,75)	139	101
11	Tapin Tengah	21.523 (10,88)	70	102
12	Tapin Utara	26.054 (13,17)	806	99
Kabupaten Tapin		197.893	91	101

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator umur harapan hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Adapun dimensi standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran riil per kapita.

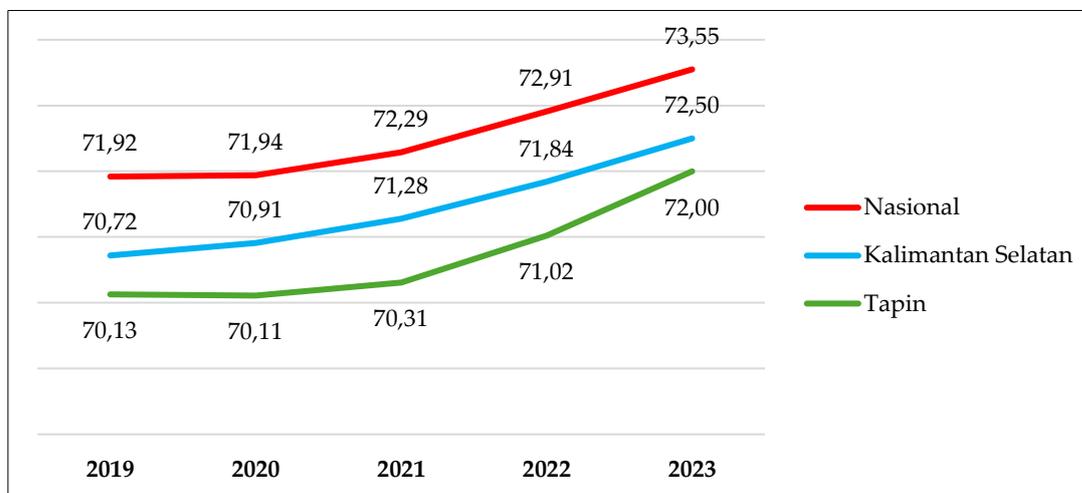
Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai antara 0–100 dan statusnya dibagi menjadi empat level, yaitu sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2019–2023 beserta IPM di tingkat provinsi dan nasional disajikan pada Grafik 2.2.

Perkembangan IPM Kabupaten Tapin terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,66%. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Tapin sebesar 70,13, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 72. Namun, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2021 IPM Kabupaten Tapin kembali mengalami peningkatan. Status IPM Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima

tahun terakhir berada pada level tinggi. Status IPM Kabupaten Tapin ini sama dengan IPM di tingkat provinsi maupun nasional.

Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Indikator pembentuk IPM ada empat, yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita. Pada Tabel 2.3 disajikan indikator IPM Kabupaten Tapin.

Tabel 2.3 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin

Indikator IPM	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
UHH	Tahun	70,23	70,40	70,57	70,88	71,16
HLS	Tahun	11,86	11,94	11,95	12,04	12,33
RLS	Tahun	7,75	7,76	7,77	7,95	8,05
Pengeluaran riil per kapita	Ribu Rupiah	12.088	11.841	11.952	12.247	12.776

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

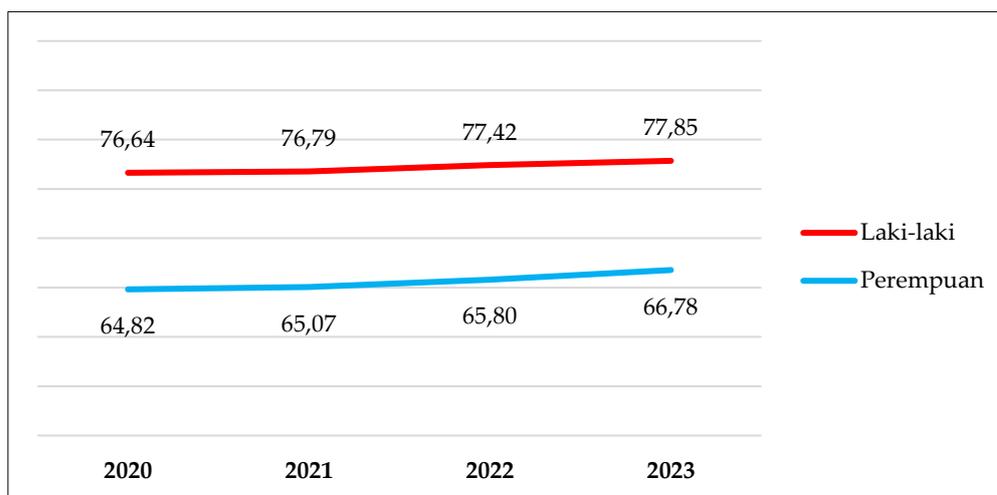
Umur harapan hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Tapin terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada kondisi terakhir tahun 2023, UHH di Kabupaten Tapin mencapai angka 71,16. Tahun 2023 ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 diharapkan dapat mempunyai peluang hidup hingga usia 71,16 tahun. Indikator IPM selanjutnya adalah pengeluaran per kapita. Menurut BPS, pengeluaran per kapita masyarakat di suatu daerah menentukan tingkat/kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada Tabel 2.3 menunjukkan pengeluaran per kapita di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan sejak tahun 2019 dari 12.088 menjadi 12.776 pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan ke angka 11.841.

Indikator IPM pada dimensi pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama Sekolah (HLS). Capaian RLS Kabupaten Tapin setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, capaian RLS sebesar 7,75, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 8,05. Capaian angka 8,05 pada tahun 2023 ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tapin hanya sampai setingkat kelas 2 SMP atau belum mampu menamatkan SMP. Sedangkan HLS Kabupaten Tapin pada tahun 2019 sebesar 11,86 dan meningkat menjadi 12,33 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa HLS di Kabupaten Tapin sudah setingkat level SMP.

2.4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Berdasarkan Gender

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir, baik pada laki-laki (rata-rata peningkatan sebesar 0,52%) maupun perempuan (rata-rata peningkatan sebesar 0,99%). Meskipun demikian, IPM di Kabupaten Tapin didominasi oleh laki-laki. Terlihat pada Grafik 2.3 bahwa terdapat rata-rata perbedaan IPM pada empat tahun terakhir sebesar 17,62% atau 11,56 poin.

Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Berdasarkan Gender



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapin juga dilihat berdasarkan indikatornya dan dibandingkan berdasarkan gender. Indikator IPM terdiri dari umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita. Pada Tabel 2.4 disajikan indikator IPM Kabupaten Tapin berdasarkan gender.

Indikator IPM di Kabupaten Tapin secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik pada laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan indikator UHH dan HLS, nilai perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Sedangkan pada indikator RLS dan pengeluaran per kapita, nilai laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Perbedaan yang paling mencolok adalah pada indikator pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran laki-laki lebih tinggi daripada wanita sebesar 63,75% dalam 4 tahun terakhir.

Tabel 2.4 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Berdasarkan Gender

Indikator IPM	Satuan	2020		2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P	L	P
UHH	Tahun	71.60	76.35	71.71	76.58	71.91	76.99	71.96	77.10
HLS	Tahun	11.93	12.00	11.94	12.01	12.17	12.02	12.18	12.33
RLS	Tahun	8.52	7.38	8.53	7.39	8.57	7.58	8.59	7.68
Pengeluaran riil per kapita	Ribu Rupiah	17,876	6,453	18,032	6,525	18,465	6,708	19,250	7,001

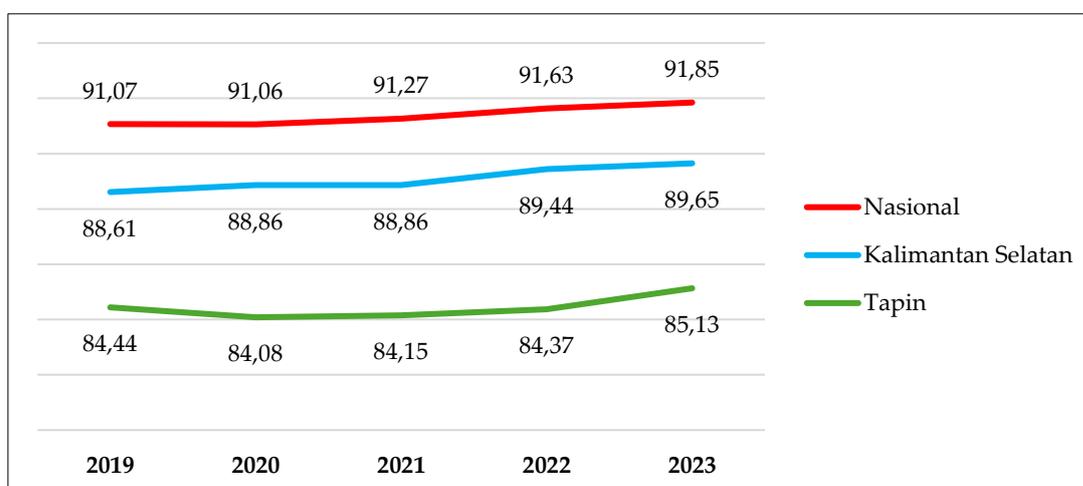
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. Keterangan: L = Laki-laki, P = Perempuan.

2.5. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks ini membandingkan capaian pembangunan perempuan dan laki-laki berdasarkan dimensi dalam IPM. Capaian IPG yang tinggi menunjukkan kualitas perempuan dan laki-laki yang semakin setara dan begitu pula sebaliknya. Capaian IPG yang baik akan berdampak terhadap optimalisasi peran masing-masing gender dalam pembangunan. Nilai IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan laki-laki. Ketika angka IPG makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun, semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2019–2023 beserta IPG di tingkat provinsi dan nasional disajikan pada Grafik 2.4.

Grafik 2.4 Indeks Pembangunan Gender



Sumber data: Badan Pusat Statistik

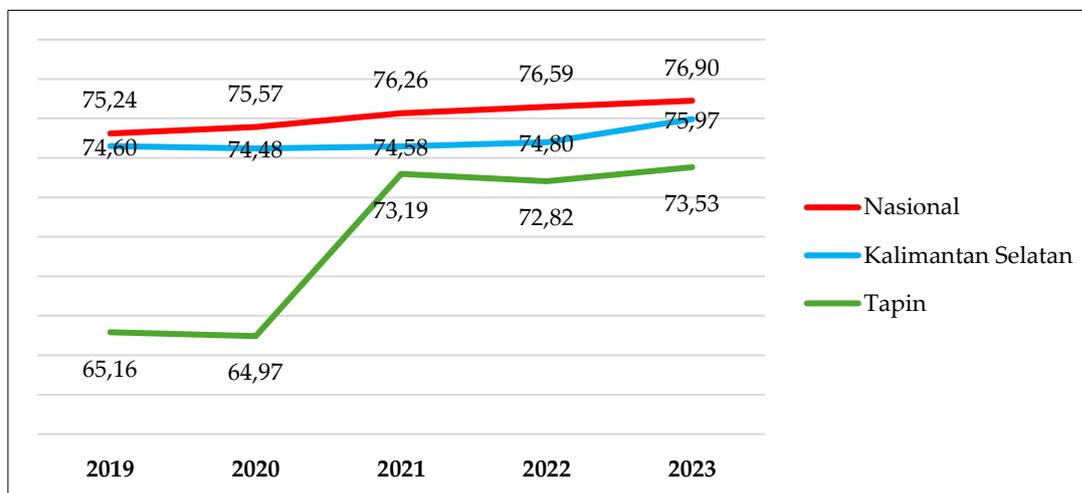
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tapin mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,20% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, IPG Kabupaten Tapin sebesar 84,44, dan meningkat menjadi 85,13 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,36 poin. Pada tahun 2021, IPG Kabupaten Tapin mengalami peningkatan. Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kesenjangan capaian kemampuan dasar (umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak) antara perempuan dan laki-laki yang semakin berkurang.

2.6. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender. Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, di bidang pengambilan keputusan melalui kedudukan dan jabatan perempuan sebagai tenaga profesional, dan di bidang ekonomi yang diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender memiliki nilai antara 0–100 dan statusnya dibagi menjadi empat level, yaitu sangat tinggi ($IDG \geq 80$), tinggi ($60 \leq IDG < 80$), sedang ($50 \leq IDG < 60$), dan rendah ($IDG < 50$). Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2019–2023 beserta IDG di tingkat provinsi dan nasional disajikan pada Grafik 2.5.

Grafik 2.5 Indeks Pemberdayaan Gender



Sumber data: Badan Pusat Statistik

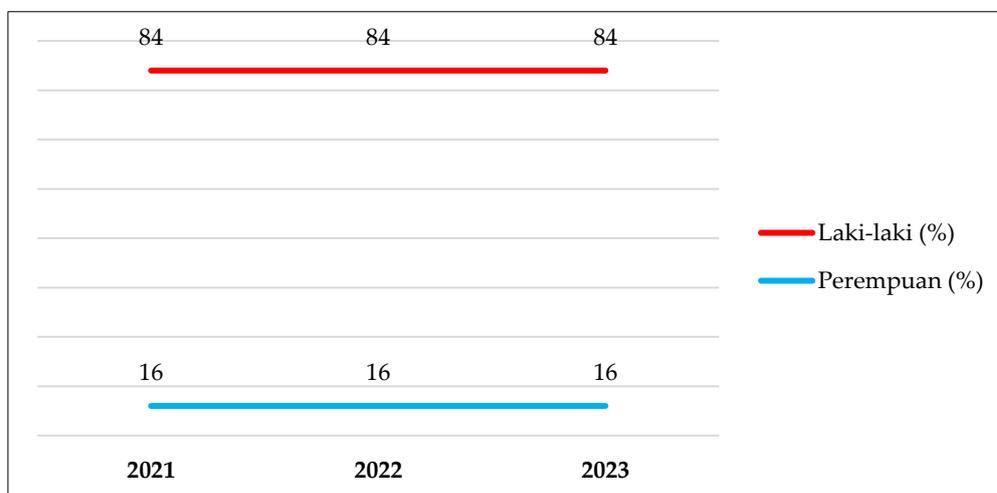
Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan 65,16 poin menjadi 73,53 poin di tahun 2023. Meskipun terdapat penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan dari tahun 2021 ke tahun 2022, tetapi IDG Kabupaten Tapin mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IDG Kabupaten Tapin berada pada level tinggi.

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tapin yang meningkat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat penurunan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Tapin. Namun demikian, IDG Kabupaten Tapin masih berada di bawah IDG Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional.

2.6.1. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Tapin

Indikator IDG di Kabupaten Tapin juga dilihat berdasarkan indikatornya, yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, kedudukan dan jabatan perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Pada Grafik 2.6, Grafik 2.7, dan Grafik 2.8 disajikan data IDG per indikator di Kabupaten Tapin.

Grafik 2.6 Keterlibatan di Parlemen Kabupaten Tapin

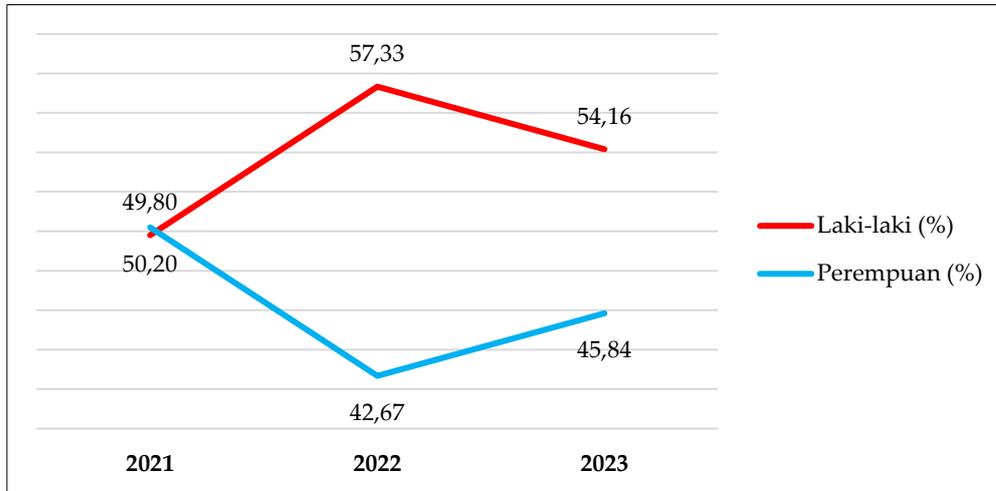


Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Indikator keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Tapin dari tahun 2021–2023 masih berada di angka 16%. Hal ini masih di bawah kebijakan afirmasi minimal 30%. Keterlibatan perempuan di parlemen sangat penting dalam pengambilan keputusan politik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan oleh lembaga negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir holistik dan responsif gender. Keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi pengarusutamaan gender.

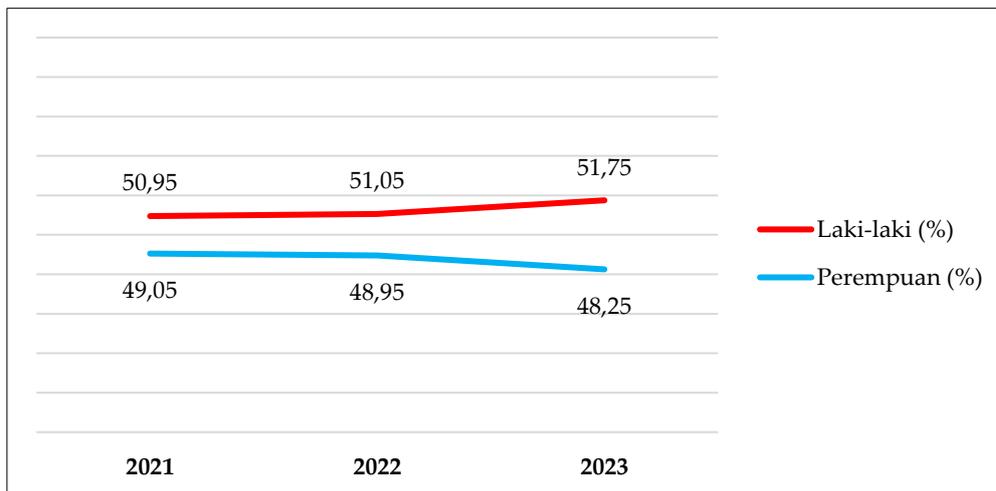
Rata-rata perbandingan persentase perempuan dan laki-laki sebagai tenaga profesional di Kabupaten Tapin sebesar 13,38% dalam tiga tahun terakhir di mana persentase laki-laki sebagai tenaga profesional lebih tinggi pada tahun 2022 dan 2023.

Grafik 2.7 Tenaga Profesional Kabupaten Tapin



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Grafik 2.8 Sumbangan Pendapatan Kerja Kabupaten Tapin



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Sumbangan pendapat kerja perempuan di Kabupaten mengalami rata-rata penurunan sebanyak 0,4% dalam tiga tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan rata-rata pendapatan kerja laki-laki yang meningkat sebanyak 0,4% pada 2021–2023.

2.7. Indeks Ketimpangan Gender

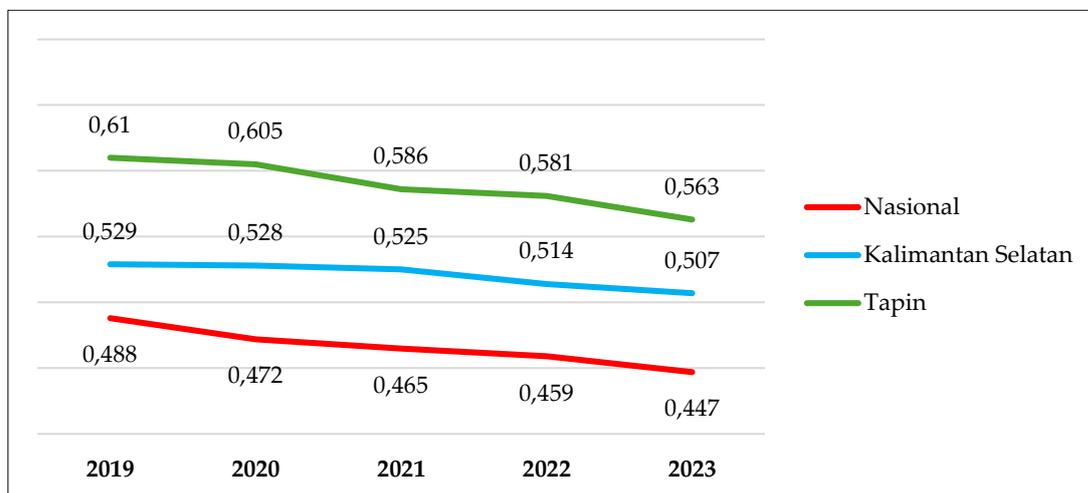
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator pembangunan yang mengukur ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indikator dimensi kesehatan reproduksi adalah proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan sebagai proksi indikator angka kematian ibu dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun sebagai

proksi indikator fertilitas remaja. Indikator dimensi pemberdayaan adalah persentase kursi legislatif (DPR/DPRD) yang diduduki oleh perempuan dan laki-laki, serta persentase penduduk 25 tahun ke atas perempuan dan laki-laki dengan pendidikan SMA ke atas. Indikator dimensi pasar tenaga kerja adalah partisipasi dalam angkatan kerja perempuan dan laki-laki.

Indeks Ketimpangan Gender memiliki nilai antara 0–1 di mana nilai IKG yang rendah menunjukkan rendahnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Ketimpangan Gender dibagi menjadi empat kelompok, yaitu 0,000–0,250, 0,251–0,500, 0,501–0,750, dan 0,751–1,000.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2019–2023 beserta IKG di tingkat provinsi dan nasional disajikan pada Grafik 2.9.

Grafik 2.9 Indeks Ketimpangan Gender



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapin tahun 2023 sebesar 0,563, turun 0,018 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,581. Capaian IKG di Kabupaten Tapin selama kurun waktu 2019–2023 mengindikasikan penurunan ketimpangan gender yang semakin baik dengan rata-rata pertumbuhan IKG sebesar 0,012. Meskipun terdapat pertumbuhan IKG di Kabupaten Tapin, IKG Kabupaten Tapin masih berada di bawah IKG Provinsi Kalimantan Selatan dan masih berada dalam kelompok ketiga, yaitu 0,501–0,750.

BAB III

CAPAIAN DAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TAPIN

Penerapan pengarusutamaan gender (PUG) di daerah berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, komitmen dan peran pimpinan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG diberikan pengakuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Anugerah Parahita Ekapraya.

Capaian PUG Kabupaten Tapin pada tahun 2021 dan 2022 melalui Anugerah Parahita Ekapraya, telah meraih predikat Madya. Adapun target penerapan PUG di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Capaian PUG Kabupaten Tapin

Tahun 2021		Tahun 2022	
Skor	Predikat	Skor	Predikat
689,74	Madya	688,37	Madya

Tabel 3.2 Target PUG Kabupaten Tapin

Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
Skor	Predikat	Skor	Predikat	Skor	Predikat	Skor	Predikat
701	Nindya	750	Nindya	801	Utama	850	Utama

Capaian PUG Kabupaten Tapin tidak terlepas dari implementasi yang sudah dilakukan oleh pihak terkait. Kedudukan PUG dalam perundang-undangan daerah berkaitan dengan kelembagaan PUG, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, regulasi penyelenggaraan PUG, serta inovasi yang mendukung PUG. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan implementasi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Tapin dalam menerapkan PUG serta kondisi-kondisi yang bisa ditingkatkan.

3.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Kabupaten Tapin telah melaksanakan PUG dalam pembangunan daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan

Gender. Di samping itu, kebijakan-kebijakan lain yang mendukung PUG juga sudah tersedia. Pada Tabel 3.3 disajikan kebijakan daerah Kabupaten Tapin yang mendukung PUG.

Tabel 3.3 Kebijakan Daerah Kabupaten Tapin terkait PUG

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Aspek
Peraturan Daerah	16	2013	Pengarusutamaan Gender	Pelaksanaan, Pemantauan
Peraturan Daerah	02	2015	Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Pelaksanaan
Peraturan Daerah	04	2019	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018–2023	Perencanaan
Peraturan Bupati	07	2014	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Tapin	Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan
Peraturan Bupati	03	2019	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018–2023	Perencanaan
Peraturan Bupati	03	2021	Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021	Evaluasi, Pengawasan
Peraturan Bupati	19	2021	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2022	Perencanaan
Surat Edaran Bupati	550/039/DP3A/2020	2020	Perihal Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Pelaksanaan, Pemantauan
Surat Edaran Bupati	910/114-UM/BKAD/2019	2019	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang Responsif Gender	Penganggaran

Pelaksanaan PUG memerlukan SDM terlatih PUG pada bidang tertentu. Kabupaten Tapin sudah memiliki SDM terlatih PUG dalam bidang-bidang tertentu. Pada Tabel 3.4, Tabel 3.5, dan Tabel 3.6 disajikan SDM terlatih masing-masing bidang yang ada di Kabupaten Tapin.

Tabel 3.4 SDM Perencana Terlatih PUG Kabupaten Tapin

No.	Nama	Instansi
1	Fauziah, S.E., M.M.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Syamsul Bahri, S.E.	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu
3	Daniel Rahmatullah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Nizar Fahlevi	BKPSDM
5	Erma H.	Badan Pendapatan Daerah

No.	Nama	Instansi
6	Ade Rahmatullah, S.E.	Dinas Lingkungan Hidup
7	Mayasari, S.E.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Siti Raudah, S.E.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Gita Ramadhana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Ema Risnawati	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	Ristya Hanisa, S.E.	Sekretariat DPRD
12	Rachmadhansyah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Riyandi Ramadhani, S.Sos.	Dinas Perhubungan
14	Nizar Fahlevi, S.Sos.	Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
15	M. Irvani Akbar T., S.Sos.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Sri Yuliana, S.E.	Kecamatan Bakarangan
17	Abi Yazid A.	Kecamatan Salam Babaris
18	Marwah	Kecamatan Tapin Selatan
19	Midiatmoko, S.K.M.	Kecamatan Bungur

Tabel 3.5 SDM Teknis Terlatih PUG Kabupaten Tapin

No.	Nama	Instansi
1	Hj. Mitya, S.E.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Noorhalimah, S.K.M., M.M.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Mawardi, S.Sos.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Akhmad Jislan, S.Pd.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Hj. Sinta Annisa, S.K.M.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Helmy Hidayat, S.K.M.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Candra Handayani, A.M.K.L.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Ni'mah Azizah, S.Ag., M.M.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Widi Handayani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Mila Kesuma Hindarti	Dinas Sosial
11	Marliani	Dinas Perindustrian
12	Uci Sanusi, S.E.	Bappelitbang
13	Nor Izatil Hasanah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Marahayun, S.H., M.H.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Muhammad Syarbani	Dinas Pertanian
16	Dina Juliani	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu
17	Roni Gunawan, S.E.	Dinas Perhubungan
18	Rina Sari, S.H.	Dinas Sosial
19	Ardi Lazuardi	Dinas Ketahanan Pangan
20	Noor Cipta Ningsih	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Nama	Instansi
21	Yulia Herlena	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	M. Boyke R. S.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	Abdul Malik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24	dr. Rini Restiaty	RSUD Datu Sanggul
25	drh. Nurul Azizah	Dinas Perikanan
26	Irwansyah	Dinas Perikanan
27	Hj. Juairiah	Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
28	Ismail	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
29	M. Rahim	Inspektorat
30	Mahrita	Bagian Kesra Setda Tapin
31	M. Rifani	Sekretariat DPRD
32	Kumala Sari	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
33	Zakiah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
34	Dewi Septi Ariani	Dinas Pendidikan
3	Umi Kalsum	Dinas Komunikasi dan Informatika
36	Husnul Alfisah	Bagian Organisasi Setda Tapin
37	Fauziah, S.Sos.	Kecamatan Tapin Tengah
38	Hatiana, S.K.M.	Kecamatan Tapin Tengah
39	Hendri Juliansyah, S.E.	Kecamatan Hatungun
40	Miliani	Kecamatan Salam Babaris
41	Nurul Hayati	Kecamatan Bungur
42	Rahmad Hidayat	Kecamatan Tapin Selatan
43	Muhammad Yusri	Kecamatan Piani
44	Hj. Darmiyati	Kecamatan Binuang
45	Lisdawati	Kecamatan Bakarangan
46	Hj. Heldawati	Kecamatan Tapin Utara

Tabel 3.6 Gender Champion Kabupaten Tapin

No.	Nama	Instansi
1	H. Yamani, S.Ak., M.M.	Ketua DPRD Kabupaten Tapin
2	Hj. Ratna Ellyani, S.I.P.	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tapin
3	Hj. Mustaidah	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tapin
4	Asep Edwin Firdaus	Mine Support Operasional Manager PT Bhumi Rantau Energi
5	dr. Alfian Yusuf, S.K.M., S.Pd., M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan
6	Hj. Imawati, S.Pd., M.M.	Kepala Dinas Pendidikan
7	Yuni Mirawati, S.Pd.AUD.	Pendidik PAUD
8	Hj. Siti Mariyam, M.Pd.	Kepala MTsN 1 Tapin
9	Hj. Rina Indriani, S.T.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	H. Muhammad Rifani, S.Pd., M.M.	Kepala Sekolah MAN 1 Tapin
11	Hj. Lailian Nor, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selain kebijakan terkait PUG yang ada di Kabupaten Tapin, masing-masing SKPD memiliki tim *focal point* PUG yang tercantum pada keputusan-keputusan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Kelembagaan PUG Kabupaten Tapin

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Aspek
Keputusan Bupati	188.45/289/ KUM/ 2019	2019	Tim Penggerak (<i>Driver</i>) Percepatan Pengarusutamaan Gender(PUG) Kabupaten Tapin	Pelaporan
Keputusan Bupati	188.45/019/ KUM/ 2020	2020	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin	Pelaksanaan
Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	019	2022	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tapin	
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin	200.1/014/ 2014	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapin	
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Tapin	400.2.2/047/ BAPPELIT BANG/ 2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	050	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan keuangan dan Aset Daerah Kab. Tapin	
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Tapin	800/047.Sek re/ BKPSDM	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tapin	900.1.13/15/ BAPENDA/ 2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapin	010	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	32	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin	

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Aspek
Perlindungan Anak Kabupaten Tapin				
Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin	017/SK/I/D PPKB/Tahun 2022	2022	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin	500.2/1.1/Se kt-DISDAG/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan (PUG) Pada Dinas Perdagangan Gender Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin	012	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin	001 /SK/I/DISB UDPAR/TA HUN 2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin	012/KEP/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	13/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	043	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin	4.5/PEG-DISPORA/I /2024		Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Tapin	500.16/045/ DPMPTSP/ 2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin	038	2022	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin	

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Aspek
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin	800.1/361/D ISDUKCAP IL/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin	
Keputusan Inspektur Kabupaten Tapin	400.2.2/106 - SK/II/SP/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Inspektorat Kabupaten Tapin	
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin	300.1/014/S K/ Pol.PP-DK/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin	
Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin	175/102.A/S ETWAN/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Binuang	25	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Bakarangan	05	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Bungur	09.1/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Candi Laras Selatan	032	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Kecamatan Candi Laras Selatan Kab. Tapin	
Keputusan Camat Hatungun	01	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Tapin Tengah	05	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Tapin Utara	11	2023	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Lokpaikat	11	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender	

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Aspek
			(PUG) Kantor Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Tapin Utara	07	2022	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Tapin Selatan	27	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin	
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau	400.7.5.7/54 /KEP/RSU D-DS/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Bakarangan	05	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Kecamatan Bakarangan Kab. Tapin	
Keputusan Camat Bungur	09.1/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Kecamatan Bungur Kab. Tapin	
Keputusan Camat Candi Laras Selatan	032	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Hatungun	01	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Tapin Tengah	05	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kab. Tapin	
Keputusan Camat Tapin Utara	11	2023	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Lokpaikat	11	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin	
Keputusan Camat Tapin Utara	07	2022	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin	

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Aspek
Keputusan Camat Tapin Selatan	27	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Tapin Selatan Kab. Tapin	
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau	400.7.5.7/54 /KEP/RSU D-DS/2024	2024	Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Kecamatan Tapin Selatan Kab. Tapin	

Kebijakan-kebijakan daerah Kabupaten Tapin pada Tabel 3.3 bertujuan untuk melaksanakan PUG di Kabupaten Tapin yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Di samping itu, Kabupaten Tapin juga telah memiliki tim *focal point* PUG dalam pembangunan kesetaraan gender. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan untuk memaksimalkan pelebagaan PUG.

Hal pertama yang dapat ditingkatkan adalah sumber daya manusia (SDM) terlatih PUG, Pada Tabel 3.4 SDM Perencana di Kabupaten Tapin belum semuanya terlatih PUG, hanya sebagian kecil atau sekitar 42,22%, sedangkan pada Tabel 3.5 menggambarkan bahwa SDM Teknis baru tersebar di 39 SKPD dari total 45 SKPD yang ada di Kabupaten Tapin atau 88,63%, tetapi untuk SDM APIP, P2UPD, SDM aparat penegak hukum belum ada yang terlatih PUG maupun PPRG termasuk Fasilitator PUG Kabupaten Tapin juga belum memiliki.

Hal kedua adalah ketersediaan peraturan/keputusan daerah terkait pokja PUG dalam menyusun aksi pokja tentang penyelenggaraan PUG lima tahunan. Berdasarkan data yang tersedia, tugas pokja PUG hanya tercantum pada dokumen Rancangan Aksi Daerah PUG, belum ada peraturan/keputusan daerah mengenai hal tersebut.

Hal ketiga adalah adanya internalisasi PUG di lingkup internal Kabupaten Tapin dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan bentuk lainnya. Berdasarkan temuan analisis, Kabupaten Tapin pernah melaksanakan pelatihan internalisasi PUG, tetapi belum ada bukti mengenai adanya sosialisasi yang pernah dilakukan terkait PUG serta bentuk kegiatan lainnya.

Hal terakhir adalah perlu adanya sistem data terpilah di tingkat kabupaten. Meskipun 29% PD memiliki publikasi data terpilah dan tersedianya publikasi rutin data sektor pada dokumen Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2022, tetapi hal ini belum bisa memberikan publikasi maksimal terkait PUG.

3.2. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Pencapaian penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan di Kabupaten Tapin pada aspek perencanaan telah memenuhi capaian pada beberapa aspek perencanaan seperti terdapatnya Regulasi/Kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam perencanaan, dilakukan analisis gender dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan, semua isu gender telah teridentifikasi berdasarkan analisis gender, dan substansi gender telah terintegrasi ke dalam RPJMD dan RPKP telah disusun berdasarkan substansi gender dalam RPJMD. Namun, aspek lainnya perlu peningkatan seperti hanya menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam analisis perencanaan responsif gender (lima tahunan dan tahunan), belum maksimalnya PD dalam menyusun renstra yang responsif gender berdasarkan perencanaan responsif gender (lima tahunan dan tahunan) dan belum maksimalnya penyusunan Renja PD berdasarkan substansi gender dalam RPKP.

Proses perencanaan pembangunan memerlukan anggaran. Dalah hal PUG, anggaran yang dibuat harus responsif gender. Pada Tabel 3.8 disajikan SKPD di Kabupaten Tapin yang memiliki Anggaran Responsif Gender.

Tabel 3.8 Data SKPD Yang Menyampaikan Dokumen Anggaran Responsif Gender Tahun 2023

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	237.122.430
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	251.695.243
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	975.727.060
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	304.899.775
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.168.281.700
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	144.539.829
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	31.185.250

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	14.086.000
4	Dinas Perdagangan	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	24.968.463
		Pengembangan Ekspor	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk	8.466.350
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.195.200.000
5	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.104.569.316
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	6.192.244
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	80.056.424
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	26.043.544
		Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	115.515.920
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	103.310.152
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Monitoring Opini dan Komunikasi Publik	47.807.200
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	32.820.464
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	112.865.394

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		Saing Keolahragaan		
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	29.894.235
9	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan	764.924.175
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	463.586.165
		Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	106.125.140
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	680.048.930
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.039.468.760
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	122.961.640
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.049.013.728
12	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	165.510.045
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	331.709.075
13	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Dan Pemberdayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	3.439.755.256

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
			UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan, Keamanan, Sopir dan Petugas Parkir	5.177.890.000
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.163.632
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.200.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.617.127
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.855.930
		Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	51.200.201
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	66.938.441
		Program Perlindungan Khusus Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	100.447.587

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	158.886.670
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.846.692
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.870.822
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	205.934.480
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	51.507.000
		Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	361.928.400
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	123.052.900

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	34.874.660
15	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan PAUD	28.050.000
		Pembinaan SD	Asistensi Pelaksana US SD	9.163.870
		Pembinaan SMP	Pelaksanaan Kompetensi Siswa Nasional (KSN)	4.120.000
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi Guru	450.000.000
16	Dinas Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	15.853.773.676
		Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	561.494.104
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	390.819.781
		Pencatatan Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	273.400.548
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemandatan dan Penyajian Database	44.314.200
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12.400.000.000
19	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	352.992.820
		Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.247.152.600
20	Dinas Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Tapin	395.079.805

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	5.138.878.247
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.461.392.515
21	Dinas Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	156.155.000
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	47.236.120
			Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	49.086.996
22	Badan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	161.274.284
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.232.991
			Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Basis Pajak Daerah	775.053.036
23	Dinas Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.000.000
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	770.353.322
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.085.720.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	18.096.000
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	523.636.232
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	44.200.000

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sarasehan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	19.397.800
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	201.710.600
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	37.212.931
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	492.335.846
			Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	148.442.525
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	174.513.400
28	Dinas Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	17.555.700
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	168.984.700
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	899.125.276

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
29	Satpol PP dan Kebakaran	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	43.980.000
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.500.000
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	65.100.000
30	Dinas Perindustrian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.787.604
31	Dinas Kesehatan	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin	56.516.600
32	Dinas Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Tapin	29.064.378
33	Kecamatan Lokpaikat	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	225.855.778
34	Kecamatan Piani	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.631.400
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.065.400
35	Kecamatan Salam Babaris	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	13.086.150
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	12.772.000
		Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	252.470.850

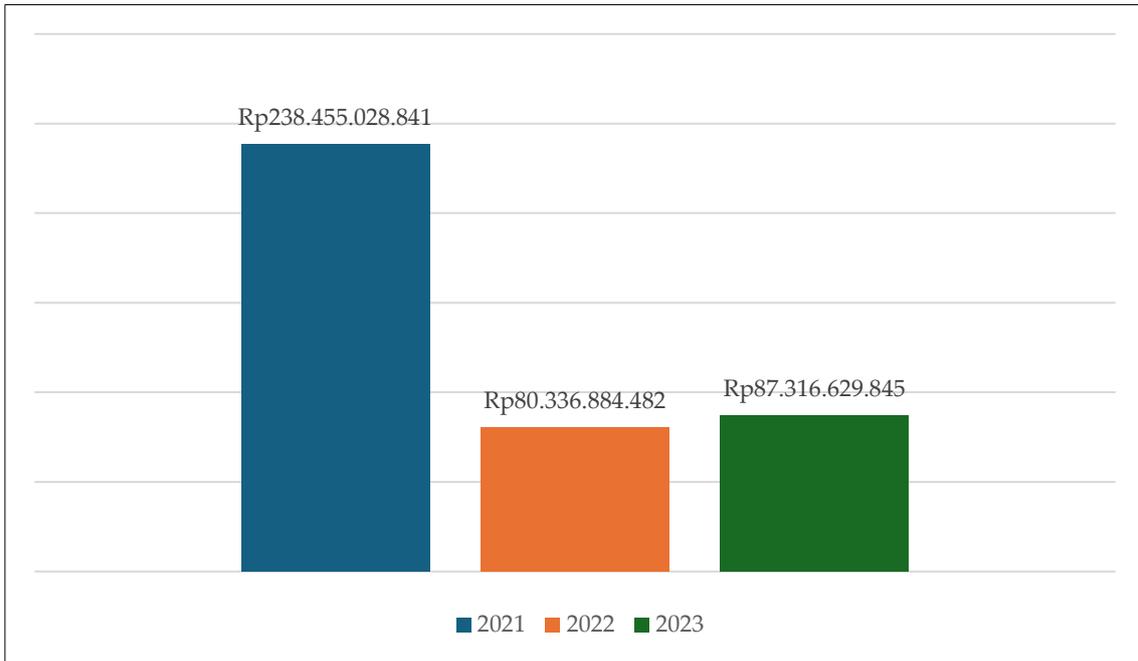
No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
36	Kecamatan Bakarangan	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.270.500
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.270.500
37	Kecamatan Candi Laras Utara	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	44.115.900
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.959.500
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.253.410
38	Kecamatan Candi Laras Selatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.576
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	19.325.192
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	122.116.648
39	Kecamatan Binuang	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.965.500
			Koordinasi Kegiatan Keagamaan	19.827.500
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.208.750
40	Kecamatan Tapin Utara	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	44.115.900
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.959.500

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.253.410
41	Kecamatan Tapin Tengah	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	312.654.570
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	29.271.000
42	Kecamatan Tapin Selatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	216.776.860
43	Kecamatan Hatungun	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.500.333
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.500.333
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.500.333
44	Kecamatan Bungur	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	115.986.250
TOTAL				87.316.629.845

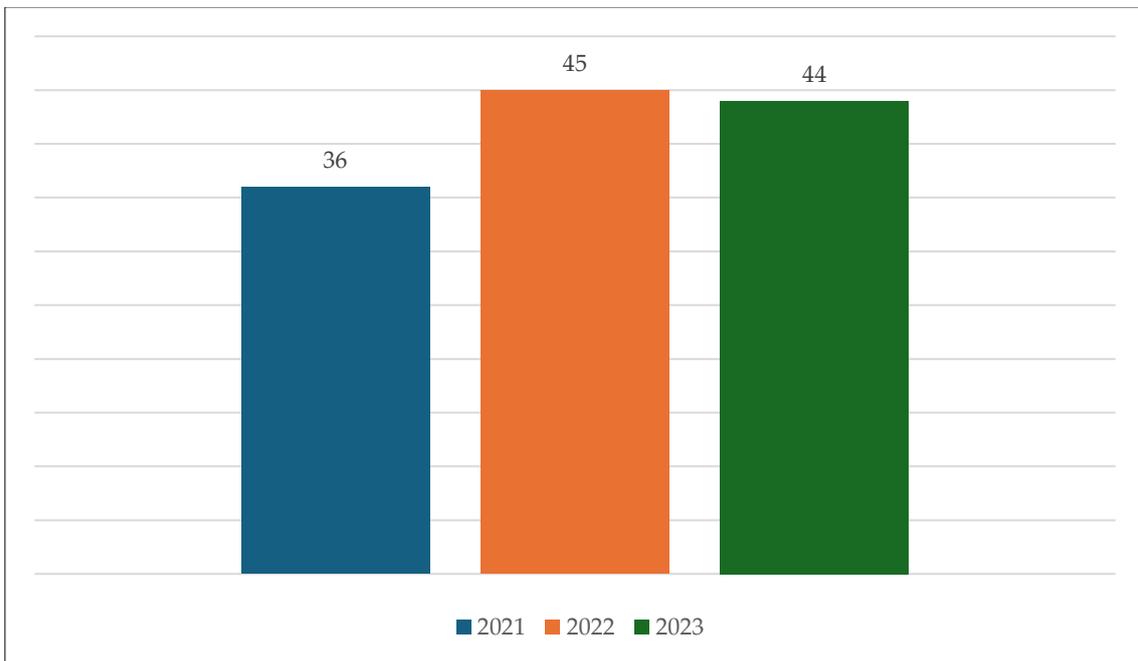
Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Penganggaran di Kabupaten Tapin mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, total Anggaran Responsif Gender (ARG) di seluruh SKPD sebesar Rp238.455.028.841. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp80.336.884.482. Akan tetapi, di tahun 2023 ARG kembali meningkat menjadi sebesar Rp87.316.629.845. Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Tapin mengalami penurunan di tahun 2022 disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran yang diakibatkan dari dampak pandemi COVID-19 sehingga beberapa kegiatan di SKPD banyak yang ditunda. Pada Grafik 3.1 disajikan perkembangan ARG Kabupaten Tapin sejak tahun 2021 hingga 2023.

Perkembangan SKPD yang mempunyai ARG sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada Grafik 3.2 disajikan jumlah SKPD yang mempunyai ARG dari tahun 2021–2023.

Grafik 3.1 Anggaran Responsif Gender Kabupaten Tapin



Grafik 3.2 Jumlah SKPD yang Mempunyai Anggaran Responsif Gender



3.3. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

3.3.1. Peran Politik Perempuan

Anggota DPRD Kabupaten Tapin berjumlah 25 orang dengan keterwakilan perempuan masih terbilang rendah. Berdasarkan data pada Tabel 3.9, hanya terdapat 4

(16%) perempuan yang menjadi anggota DPRD. Hal ini berlawanan dengan jumlah anggota DPRD laki-laki sebanyak 21 (84%) orang. Padahal target nasional untuk keterwakilan perempuan di parlemen minimal sebesar 30%.

Tabel 3.9 Anggota DPRD di Kabupaten Tapin

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Golkar	6	2	8
Demokrat	2	-	2
PKS	2	-	2
Nasdem	2	-	2
Gerindra	1	1	2
PAN	1	-	1
PDIP	3	-	3
PKB	2	1	3
PPP	1	-	1
Berkarya	1	-	1
Total	21	4	25

3.3.2. Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya adalah adanya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kabupaten Tapin dengan komitmen yang tinggi mendukung amanat ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan daerah. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Kebijakan Daerah Kabupaten Tapin terkait Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang
Peraturan Daerah	16	2013	Pengarusutamaan Gender
Peraturan Daerah	01	2015	Perlindungan Anak
Peraturan Daerah	02	2015	Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
Peraturan Daerah	09	2016	Pembentukan dan Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
Peraturan Bupati	24	2020	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Bupati	10	2021	Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang
Peraturan Bupati	11	2020	Pencegahan Perkawinan Anak
Keputusan Bupati	188.45/348/KUM/2017	2017	Pembentukan Kepengurusan Pusat-pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2017
Keputusan Bupati	188.45/196/KUM/2021	2021	Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kabupaten Tapin
Keputusan Bupati	188.45/154/KUM/2022	2022	Pembentukan Sub Klaster Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana Kabupaten Tapin

Kebijakan-kebijakan pada Tabel 3.10 diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti adanya komunikasi, informasi, dan edukasi melalui penayangan *videotron* di ruang publik, melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tapin, serta pembagian brosur ke masyarakat Kabupaten Tapin.

Kabupaten Tapin juga menyediakan layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Layanan tersebut meliputi (1) penerimaan laporan dan/atau penjangkauan, (2) pemberian informasi tentang hak korban, (3) fasilitasi pemberian layanan kesehatan, psikologis, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, (3) penyediaan layanan hukum, (4) identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi dan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban, (5) fasilitasi kebutuhan korban kekerasan penyandang disabilitas, dan (6) melakukan koordinasi serta kerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya.

Tabel 3.11 Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tapin

Jenis Kekerasan	2021	2022	2023
Fisik	-	6	1
Psikis	-	-	-
Seksual	11	8	2
Penelantaran	-	4	4
<i>Trafficking</i>	-	-	-
Eksploitasi	-	-	-
Lain-lain	3	5	8
Jumlah	14	23	15

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tapin dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Berdasarkan data pada Tabel 3.11, terdapat 15 kasus pada 2023, 23 kasus pada 2022, dan 14 kasus pada tahun 2021 terkait kekerasan bagi korban perempuan dan

anak yang sudah mendapatkan layanan komprehensif oleh UPTD PPA. Sayangnya, berdasarkan Evaluasi PUG Tahun 2022, UPTD PPA Kabupaten Tapin belum terstandardisasi.

3.3.3. Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pendidikan

Perkembangan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tapin di setiap jenjang mengalami peningkatan. Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan gambaran dari proporsi jumlah penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK bisa lebih dari 100, apabila jumlah populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu lebih besar dari jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian.

Tabel 3.12 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tapin

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni				Angka Partisipasi Kasar			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
SD/MI/Sederajat (7–12 tahun)	98.98	99.41	99.38	99.09	112.66	114.35	113.08	105.56
SMP/MTs/Sederajat (13–15 tahun)	72.20	72.42	72.86	77.52	86.23	84.52	89.62	94.26
SMA/SMK/MA/Sederajat (16–18 tahun)	54.79	54.76	54.89	52.38	65.08	63.10	64.59	71.69

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Berdasarkan data pada Tabel 3.12, pada tahun 2023 APM SD/MI/Sederajat sebesar 99.09 yang menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia sekolah SD, ada 99 anak yang sedang bersekolah pada jenjang SD. Pada jenjang SMP/MTs/Sederajat, capaian APM tahun 2023 sebesar 77.52. Ini artinya dari 100 penduduk usia sekolah SMP hanya ada 77 atau 78 anak yang sedang bersekolah pada jenjang SMP. Adapun pada jenjang SMA, capaian APM pada tahun 2023 sebesar 52.38. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia sekolah SMA hanya ada 52 anak yang sedang bersekolah pada jenjang SMA. Rendahnya capaian APM jenjang SMP dan SMA bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi guna menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Tapin.

Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SD pada tahun 2023 sudah mencapai 105.56. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tapin mampu menampung penduduk

usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Sedangkan APK untuk jenjang SMP dan SMA pada tahun 2023 masih di bawah 100.

Tabel 3.13 Data Peserta Didik Kabupaten Tapin

Jenjang	Laki-laki	Perempuan	Total
KB	748	753	1.501
PKBM	2.692	2.097	4.789
SD	9.176	8.294	17.470
SKB	109	87	196
SMP	2.097	1.843	3.940
TK	2.784	2.448	5.232
TPA	41	23	64
Total	17.647	15.545	33.192

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

Berdasarkan data pada Tabel 3.13, jumlah siswa sekolah berdasarkan jenjang PAUD sampai dengan SMP sebanyak 33.192 siswa yang terdiri dari 17.647 siswa laki-laki dan 15.545 siswa perempuan.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Di Kabupaten Tapin Jumlah SD yang melaksanakan Pendidikan Inklusif sebanyak 178 sekolah untuk jenjang SMP sebanyak 28 sekolah, Lembaga PAUD sebanyak 195 lembaga dan untuk Pendidikan non-formal sebanyak 14 lembaga. Pada Tabel 3.14, Tabel 3.15, dan Tabel 3.16 disajikan daftar sekolah dan Lembaga yang melaksanakan pendidik inklusif di Kabupaten Tapin.

Tabel 3.14 Daftar Satuan Pendidikan dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Jenjang PAUD di Kabupaten Tapin

Kecamatan	Nama Sekolah	Tingkat Pendidikan			Jenis KB												
		KB	TK A	TK B	K	C	H	Q	B	F	C1	D1	E	P	D	O	
Binuang	TKS Aster			√	√												
Candi Laras Selatan	TKS Tunas harapan			√				√									
Lokpaikat	KB Lestari Binderang	√						√									
Tapin Tengah	TKS Tunas Harapan		√							√							
Tapin Utara	TK IT Al-Madani		√	√				√								√	
	TKS Idhata			√				√		√							
Jumlah siswa = 10 siswa																	

Tabel 3.15 Daftar Satuan Pendidikan dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Jenjang SD di Kabupaten Tapin

Kecamatan	Nama Sekolah	Tingkat Pendidikan						Jenis KB													
		1	2	3	4	5	6	K	C	H	Q	B	F	C ₁	D ₁	E	P	D	O		
Bakarangan	SDN Bundung 1	√	√	√	√	√	√														
	SDN Tangkawang					√	√	√		√											
Binuang	SDN A.Yani Pura 1			√				√		√											
	SDN Binuang 2	√								√											
	SDN Binuang 4	√								√											
	SDN Binuang 6	√		√						√											
	SDN Padang Sari			√								√									
Bungur	SDN Hangui 1					√		√													
	SDN Timbung						√	√													
Candi Laras Selatan	SDN Candi Laras					√				√											
Candi Laras Utara	SDN Buas Buas Hilir	√												√							
	SDN Margasari Ilir 2		√		√	√	√			√											
	SDN Sungai Putting				√					√				√							
Hatungun	SDN Bagak			√						√		√	√								
	SDN Batu Hapu		√							√		√	√								
Salam Babaris	SDN Kambang Habang 2	√																			
	SDN Salam Babaris 2				√			√													
	SDN Swato Baru				√			√													
Tapin Selatan	SDN Lawahan Cempaka	√								√											
	SDN Rumintin 1				√			√													
	SDN Rumintin 2				√		√	√		√											
	SDN Rumintin 3					√		√													
	SDN Tambarangan 1			√		√		√													
	SDN Tambarangan 2		√			√	√	√	√												
	SDN Tandui 1				√					√											
	SDN Tatakan 1						√	√													
Tapin Tengah	SDN Kepayang				√			√		√											
	SDN Labung 1					√		√													
	SDN Labung 2		√															√			
	SDN Mandurian		√			√	√	√													
	SDN Mandurian Hilir					√	√						√						√		
	SDN Pandahan 1						√	√													
	SDN Pematang Karang Hulu			√				√				√									
Tapin Utara	SDN Kupang 1					√		√													
	SDN Rangda Malingkung 4				√			√													

Kecamatan	Nama Sekolah	Tingkat Pendidikan						Jenis KB											
		1	2	3	4	5	6	K	C	H	Q	B	F	C ₁	D ₁	E	P	D	O
	SDN Rangda Malingkung 5	√	√	√	√	√		√	√		√			√		√		√	
	SDN Rantau Kanan 2	√					√	√					√						
Jumlah siswa = 76 siswa																			

Tabel 3.16 Daftar Satuan Pendidikan dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Jenjang SMP di Kabupaten Tapin.

Kecamatan	Nama Sekolah	Tingkat Pendidikan			Jenis KB															
		7	8	9	K	C	H	Q	B	F	C ₁	D ₁	E	P	D	O				
Bakarangan	SMPN 2 Bakarangan	√	√		√															
Bungur	SMPN 1 Bungur			√	√															
Candi Laras Utara	SMPN 1 Candi Laras Utara	√					√													
Tapin Selatan	SMPN 1 Tapin Selatan	√	√		√	√		√												
Tapin Utara	SMPN 2 Rantau		√		√															
Jumlah siswa = 10 siswa																				

3.3.4. Kesetaraan Gender dalam Bidang Kesehatan

Angka Harapan Hidup

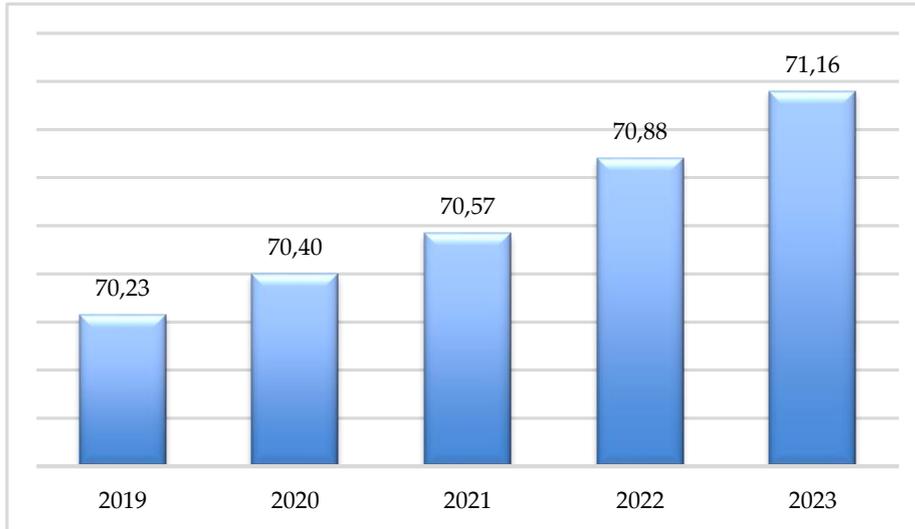
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Tapin terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 angka harapan hidup di Kabupaten Tapin mencapai angka 71,16 tahun yang berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 diharapkan dapat mempunyai peluang hidup hingga usia 71,16 tahun. Angka ini juga lebih baik dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun masih berada di bawah angka Nasional. Pada Grafik 3.3 disajikan capaian angka harapan hidup kabupaten Tapin tahun 2019 sampai dengan 2023.

Angka Kematian Ibu dan Bayi

Indikator lain yang mendukung Angka Harapan Hidup adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu jumlah kematian ibu saat melahirkan dari 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi yaitu jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Terlihat pada Tabel 3.17 bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Tapin mengalami penurunan

sejak tahun 2021 yang mencapai 385 per 100.000 kelahiran hidup kemudian di tahun 2022 yaitu sebesar 301 dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi sebesar 251. Sedangkan, untuk angka kematian bayi selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2021 yang mencapai 10 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat sebanyak 13 pada tahun 2022 kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 19 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

Grafik 3.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Tabel 3.17 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapin

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu	31	187	93	149	385	301	251
Angka Kematian Bayi	12	13	11	34	10	13	19

Prevalensi *Stunting*

Dalam rangka Pembangunan Bidang Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tapin untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapin yang sehat, dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting*, Pemerintah saat ini terus berupaya untuk mencapai target penurunan prevalensi *stunting* dalam RPJMN 2020–2024 menjadi 14%. Upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara terintegrasi dan konvergen.

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil atau anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dari anak balita. Intervensi anak

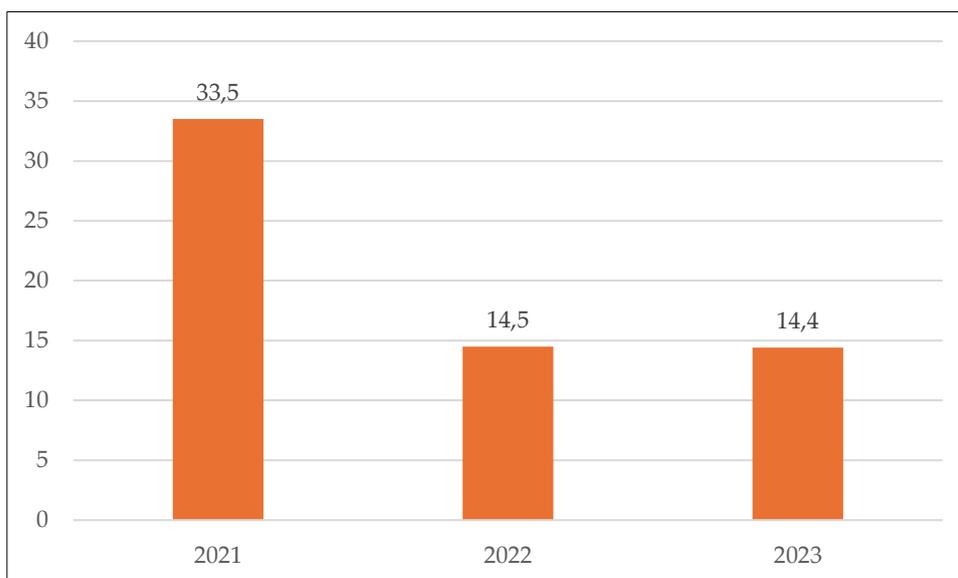
kerdil (*stunting*) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah, serta dunia usaha/masyarakat. Adapun angka *stunting* di Kabupaten Tapin berdasarkan data EPPBGM Dinas Kesehatan pada tahun 2023 sebesar 11,34 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 11,43 di mana tahun sebelumnya mencapai 11,54. Sedangkan berdasarkan survei SSGI/SKI Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* di Kabupaten Tapin di Tahun 2021 sebesar 33,5% kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 14,5% dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 14,4%. Pada Tabel 3.18 dan Grafik 3.4 disajikan data prevalensi *stunting* berdasarkan hasil EPPGBM Dinas Kesehatan dan survei SSGI/SKI Kementerian Kesehatan Kabupaten Tapin dari tahun ke tahun.

Tabel 3.18 Data Prevalensi Stunting Kabupaten Tapin

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Tapin	16,85	13,73	11,54	11,43	11,34
Kalimantan Selatan	18,98	12,2	10,7	9,1	10,3

Sumber data: Hasil Entry EPPGBM 2019–2023

Grafik 3.4 Prevalensi Stunting Kabupaten Tapin Berdasarkan SSGI/SKI Kementerian Kesehatan



Berdasarkan Tabel 3.19 bahwa untuk TFR atau Angka Kelahiran Total adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang Perempuan pada akhir masa reproduksinya dengan Mengelompokkan Umur Wanita Usia Subur (WUS) dari usia 15–49 Tahun dibagi 1.000. Dengan capaian 1,81 TFR yang mana realisasi sejak tahun 2020 sampai 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,81, berarti kebanyakan masyarakat yang berada di Kabupaten Tapin rata-rata melahirkan anak sekitar 2 orang per kepala keluarga.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Bidang Urusan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

No.	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,25	1,7	1,96	1,81
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	-	-	59,11
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (mCPR)	84,12	85,21	75,1	79,28
4	<i>Unmet Need</i>	8,01	7,22	13,87	5,5
5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (ASFR)	-	-	-	17

Kemajuan Pembangunan keluarga dapat diukur melalui indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang terdiri dari tiga dimensi yakni ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. iBangga berguna untuk melihat lebih detail, dalam rangka menyelesaikan banyak hal, mulai dari masalah sosial, masalah kemiskinan, sampai masalah yang terkait dengan *parenting* serta masalah remaja, guna mewujudkan keluarga yang tenteram, mandiri, dan bahagia. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut dimensi ketenteraman, kebahagiaan, dan kemandirian yang mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan dengan nilai capaian sebesar 50, yang bersumber dari hasil perhitungan BKKBN Pusat. Persentase pemakaian Kontrasepsi KB (mCPR) dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,29%, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mencapai target sebesar 88,13% dikarenakan adanya perubahan penggunaan aplikasi BKKBN dari Statistik Rutin ke New Siga yang mana pada tahun 2022 masih banyak data-data yang belum di-*input* oleh PKB/PLKB sampai batas waktu yang telah ditentukan dan juga New Siga telah menggunakan BNBA. Sedangkan dari tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,53% dari target yang telah ditetapkan.

Persentase pemakaian kontrasepsi (mCPR) adalah pasangan usia subur yang aktif dalam menggunakan alat kontrasepsi KB sebesar 25.866 terdiri dari suntik 14.837, pil 8.817, kondom 153, *implant* 1.517, IUD 270, vasektomi 8, tubektomi 256, dan mal 8, sesuai dengan Laporan New Siga Per 31 Desember 2023 dengan cara perhitungan jumlah peserta KB aktif (25.866) dibagi jumlah pasangan usia subur (32.625)*100 = 79,28%. *Unmet Need* yang mana sejak tahun 2020 sampai 2023 mengalami penurunan yang mana penurunan di sini berkorelasi positif terhadap hasil yang dicapai dari tahun 2020 sebesar 8,01 menjadi 5,5 di tahun 2023 sehingga sedikit masyarakat yang belum terlayani dalam penggunaan kontrasepsi baik Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda yang sudah menggunakan kontrasepsi.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi

atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu, wanita yang belum haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan waktu itu, dan wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran sebelumnya, atau suatu kondisi yang mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mengambil keputusan tidak menggunakan alat kontrasepsi KB. Dengan rincian sesuai dengan laporan New Siga di tingkat kabupaten, IAT sebesar 596 dan TIAL sebesar 1.201 dengan perhitungan jumlah PUS IAT+TIAL (596 +1.201) / jumlah PUS (32.625) * 100 = 5,51 %. Yang dimaksud dengan IAT adalah pasangan usia subur yang ingin anak di tunda sedangkan TIAL adalah Pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi. Angka Kelahiran Remaja umur 15–19 Tahun (ASFR) ASFR 15–19 tahun atau angka kelahiran remaja kelompok usia 15–19 tahun per 1000 wanita (WUS) untuk tahun 2023 adalah sebesar 17 kelahiran per 1.000 wanita (WUS)

3.3.5. Kesetaraan Gender dalam Capaian Pembangunan Ekonomi

Salah satu indikator PUG adalah kesetaraan gender dalam capaian pembangunan ekonomi. Indikator ini dilihat dari perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja. Pada Tabel 3.20 dan Tabel 3.21 disajikan data pekerja berdasarkan jenis kelamin yang ada di Kabupaten Tapin.

Tabel 3.20 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan
Berusaha sendiri	17.467	13.502
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	11.958	5.879
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	744	140
Buruh/Karyawan/Pegawai	24.968	9.903
Pekerja bebas	2.269	231
Pekerja keluarga/tidak dibayar	2.526	8.209
Jumlah	59.932	37.864

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

Tabel 3.20 memperlihatkan bahwa mayoritas pendudukan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja adalah laki-laki. Terdapat perbedaan sebesar 37% antara laki-laki dan perempuan yang bekerja.

Tabel 3.21 memperlihatkan bahwa, secara keseluruhan, Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten didominasi oleh perempuan. Meskipun demikian, jabatan Eselon didominasi oleh laki-laki.

Tabel 3.21 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Kabupaten Tapin

Jabatan	2022		2023	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Fungsional Tertentu	909	1.491	1.031	1.817
Fungsional Umum	465	390	327	178
Struktural	270	179	329	133
Eselon V	-	-	-	-
Eselon IV	125	116	183	68
Eselon III	116	55	117	57
Eselon II	29	8	29	8
Eselon I	-	-	-	-
Jumlah	1.644	2.060	1.687	2.128

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

3.3.6. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Kabupaten Tapin telah mengimplementasikan PUG di berbagai bidang, baik di bidang Hukum, Politik, Sosial, Ekonomi, dan Lainnya. Pada Tabel 3.22, Tabel 3.23, Tabel 3.24,

Tabel 3.25, dan Tabel 3.26 disajikan implementasi masing-masing SKPD dalam PUG beserta pagu anggarannya.

Tabel 3.22 Implementasi PUG dalam Bidang Hukum

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Dinas Perdagangan	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	24.968.463
2	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan	764.924.175
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.163.632
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.200.000

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.617.127
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.855.930
		Program Perlindungan Khusus Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	100.447.587
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	158.886.670
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.846.692
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.870.822
4	Inspektorat		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.247.152.600
5	Dinas Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.000.000
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	770.353.322

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
			Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.085.720.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	18.096.000
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	523.636.232
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	201.710.600
7	Satpol PP dan Kebakaran	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	43.980.000
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.500.000
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	65.100.000
		Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	252.470.850
Total				8.967.493.582

Tabel 3.23 Implementasi PUG dalam Bidang Politik

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.039.468.760
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	122.961.640

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.049.013.728
2		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	205.934.480
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	44.200.000
		Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sarasehan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	19.397.800
Total				17.480.976.408

Tabel 3.24 Implementasi PUG dalam Bidang Sosial

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	31.185.250
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	14.086.000
2	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.104.569.316
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	6.192.244

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	80.056.424
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	680.048.930
4	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	165.510.045
		Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	331.709.075
5	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Dan Pemberdayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota	3.439.755.256
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan, Keamanan, Sopir dan Petugas Parkir	5.177.890.000
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	361.928.400
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	123.052.900

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
			yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	
		Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	34.874.660
7	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan PAUD	28.050.000
		Pembinaan SD	Asistensi Pelaksana US SD	9.163.870
		Pembinaan SMP	Pelaksanaan Kompetensi Siswa Nasional (KSN)	4.120.000
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi Guru	450.000.000
8	Dinas Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	15.853.773.676
		Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	561.494.104
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	390.819.781
		Pencatatan Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	273.400.548
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemandataan dan Penyajian Database	44.314.200
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12.400.000.000
11	Dinas Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Tapin	395.079.805
		Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	5.138.878.247

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.461.392.515
12	Dinas Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	156.155.000
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	47.236.120
			Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	49.086.996
13	Badan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	161.274.284
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.232.991
			Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Basis Pajak Daerah	775.053.036
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	201.710.600
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa	37.212.931
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	492.335.846
			Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	148.442.525
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	174.513.400
17	Dinas Kesehatan	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin	56.516.600

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
18	Kecamatan Lokpaikat	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	225.855.778
19	Kecamatan Piani	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.631.400
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.065.400
20	Kecamatan Salam Babaris	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	13.086.150
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	12.772.000
		Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	252.470.850
21	Kecamatan Bakarangan	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.270.500
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.270.500
22	Kecamatan Candi Laras Utara	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	44.115.900
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.959.500
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.253.410
23	Kecamatan Candi Laras Selatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.576
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	19.325.192
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	122.116.648

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
24	Kecamatan Binuang	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.965.500
			Koordinasi Kegiatan Keagamaan	19.827.500
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.208.750
25	Kecamatan Tapin Utara	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	44.115.900
			Program Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.253.410
26	Kecamatan Tapin Tengah	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	312.654.570
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	29.271.000
27	Kecamatan Tapin Selatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	216.776.860
28	Kecamatan Hatungun	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	3.500.333
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.500.333
29	Kecamatan Bungur	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	115.986.250
Total				52.691.861.285

Tabel 3.25 Implementasi PUG dalam Bidang Ekonomi

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Dinas Perdagangan	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	24.968.463
		Pengembangan Ekspor	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk	8.466.350
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.195.200.000
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	26.043.544
		Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	115.515.920
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	103.310.152
3	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu	Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan	764.924.175
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	463.586.165
		Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah	106.125.140
4	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	165.510.045
		Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	331.709.075
		Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.247.152.600

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
5	Dinas Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	17.555.700
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	168.984.700
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	899.125.276
6	Dinas Perindustrian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.787.604
7	Dinas Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Tapin	29.064.378
Total				5.684.029.287

Tabel 3.26 Implementasi PUG dalam Bidang Lainnya

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	237.122.430
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	251.695.243
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	975.727.060
2	Badan Kepegawaian dan	Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	304.899.775
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.168.281.700

No.	SKPD	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
	Pengembangan SDM		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	144.539.829
19	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	352.992.820
		Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.247.152.600
			Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	148.442.525
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	174.513.400
Total				5.005.331.382

3.3.7. Responsifitas Gender pada Fasilitas Umum

Responsifitas gender pada fasilitas umum merupakan gambaran atau kondisi suatu fasilitas umum yang sudah responsif dengan kebutuhan kelompok gender. Tabel 3.27 menyajikan daftar fasilitas umum responsif gender di Kabupaten Tapin.

Tabel 3.27 Fasilitas Umum Responsif Gender

No.	SKPD	WC Terpisah	Ruang Bermain Anak	Ruang Laktasi	Parkir Khusus Wanita
1	Sekretariat Daerah	√			
2	DPRD	√			
3	Inspektorat				
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan				
5	Badan Keuangan Dan Aset Daerah				
6	Badan Pendapatan Daerah				
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			√	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
9	Badan Kesatuan Bangsa				

No.	SKPD	WC Terpisah	Ruang Bermain Anak	Ruang Laktasi	Parkir Khusus Wanita
	dan Politik				
10	Dinas Ketahanan Pangan				
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
12	Dinas Perhubungan				
13	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran				
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
15	Dinas Kesehatan	√		√	
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
17	Dinas Tenaga Kerja			√	
18	Dinas Pendidikan	√		√	
19	Dinas Pemuda dan Olahraga				
20	Dinas Sosial			√	
21	Dinas Pertanian				
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	√			
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√	√	√	
27	Dinas Perindustrian				
28	Dinas Lingkungan Hidup			√	
29	Dinas Perdagangan				
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√			
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	√	√	
32	Dinas Perikanan				
33	RSUD Datu Sanggul	√	√	√	√
34	Kecamatan Tapin Utara				

No.	SKPD	WC Terpisah	Ruang Bermain Anak	Ruang Laktasi	Parkir Khusus Wanita
35	Kecamatan Tapin Selatan				
36	Kecamatan Tapin Tengah				
37	Kecamatan Bakarangan				
38	Kecamatan Bungur				
39	Kecamatan Binuang	√		√	
40	Kecamatan Lokpaikat	√			
41	Kecamatan Candi Laras Utara				
42	Kecamatan Candi Laras Selatan				
43	Kecamatan Piani			√	
44	Kecamatan Hatungun	√			
45	Kecamatan Salam Babaris				

Berdasarkan Tabel 3.27, SKPD di Kabupaten Tapin yang sudah mempunyai Ruang Laktasi di kantor pada tahun 2023 sebanyak 11 SKPD, di antaranya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Datu Sanggul, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Piani. Sedangkan SKPD yang mempunyai WC terpisah dikantor pada tahun 2023 sebanyak 12 SKPD, di antaranya adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Datu Sanggul, Kecamatan Binuang, Kecamatan Lokpaikat, dan Kecamatan Hatungun. Selanjutnya untuk fasilitas Ruang Bermain Anak hanya ada 3 SKPD yang telah memilikinya, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan RSUD Datu Sanggul. SKPD yang memiliki Fasilitas Parkir Khusus Wanita hanya terdapat pada RSUD Datu Sanggul.

3.3.8. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan yang didirikan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang mempunyai tugas mendidik dan melatih penduduk Indonesia di bidang pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan non formal dan sekaligus lembaga non pemerintah, PKBM dituntut untuk mampu berkkiprah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan semangat pendidikan untuk semua. Hal ini senada dengan lembaga-

lembaga pendidikan formal lainnya. Namun demikian, banyak ditemukan kendala-kendala di lapangan terutama berkaitan dengan akses pendidikan yang belum merata, khususnya dalam perimbangan pendidikan bagi peserta didik laki-laki dan perempuan, misalnya yang masih terlihat belum seimbang bukan hanya dalam perspektif peserta didiknya tetapi juga dalam konteks pendidiknya. Pada Tabel 3.28 disajikan daftar LPLPP yang ada di Kabupaten Tapin pada tahun 2023.

Tabel 3.28 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Tapin

No.	Nama Lembaga	Kecamatan
1	Pkbn Al Miftah	Bakarangan
2	Pkbn Karya Muda	Bakarangan
3	Pkbn Sasangga Banua	Binuang
4	Pkbn Pangeran Muhammad Al Fatih	Candi Laras Utara
5	Pkbn Mitra Kencana	Hatungun
6	Pkbn Berkah Ilmu	Lokpaikat
7	Pkbn Sirang Pitu	Miawa
8	Pkbn Insan Peduli	Salam Babaris
9	Pkbn Setia Kawan	Tapin Selatan
10	Pkbn Citra Mandurian Tapin	Tapin Tengah
11	Pkbn Ruhui Rahayu	Tapin Tengah
12	Pkbn Al Mukaromah	Tapin Utara
13	Pkbn Lathiiful Khabiir	Tapin Utara
14	Sfnf Skb Tapin	Tapin Utara

3.3.9. Lembaga Penyedia Pelayanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin. Pembentukan UPTDPPA di Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 4 Tahun 2021. Pelayanan yang diberikan oleh UPTDPPA Kabupaten Tapin berupa (1) menerima pengaduan, (2) penjangkauan korban, (3) pengelolaan kasus, (4) mediasi, dan (5) pendampingan dan pemulihan.

Sejak berdirinya UPTD PPA Kabupaten Tapin, jumlah kasus yang dilayani dari tahun ke tahun disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29 Tabel Jumlah Kasus Anak dan Perempuan yang Dilayani UPTD PPA Kabupaten Tapin

Kasus	2021		2022		2023	
	Masuk	Dilayani	Masuk	Dilayani	Masuk	Dilayani
Hak Asuh Anak	3	3	-	-	4	4
Kekerasan dalam Rumah Tangga	-	-	-	-	2	2
Kekerasan Fisik	-	-	6	6	1	1
Pelecehan Seksual	11	11	8	8	2	2
Penelantaran	-	-	4	4	4	3
Lainnya	-	-	5	5	2	2
Total	14	14	23	23	15	15

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Di Kabupaten Tapin, pengembangan DRPPA sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 di Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang. Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) Kabupaten Tapin yang dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. Dasar hukum pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga Kabupaten Tapin.

1. Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/ KUM/2021 Tentang Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Tapin
2. Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/KUM/2023 Tentang Penetapan Desa Pilot Project Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Tapin Tahun 2023, Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang ditetapkan sebagai Desa Pilot Project Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Tapin Tahun 2023

Tabel 3.30 Rencana Aksi TPK2D Kabupaten Tapin

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan
1	Memiliki Akte Nikah	1. Isbat Nikah	Tim Penggerak PKK	Proses Pengusulan
		2. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan	DP3A	Sudah dilaksanakan
2		1. Pelayanan keliling dengan Inovasi	Dinas Kependudukan	

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan
	Anak memiliki Akte Kelahiran	PELANGI (Pelayanan Langsung di Datangi)	dan Pencatatan Sipil	Sudah Dilaksanakan
		2. Desa adminduk untuk semua dokumen kependudukan (KTP, KK, dll)		
		3. Bekerja sama dengan Poskesdes dengan Inovasi MEDOK (Melahirkan Dapat Dokumen)		
		4. Sosialisasi kebijakan kependudukan		
		5. Sosialisasi kependudukan digital.		
3	Suami dan istri tinggal serumah (keluarga tidak terpisah)	1. Pembentukan PUSPAGA	DP3A	SK Kepala Desa
		2. Kampung Keluarga Berkualitas	DPPKB	
		3. Tim Pendamping Keluarga		
4	Mampu makan lengkap 2 kali sehari	1. Pasar Murah untuk keluarga yang rentan ekonomi	Dinas Perdagangan	
		2. Pemberian bantuan kolam terpal D3 sebanyak 2 unit	Dinas Pertanian	
		3. Bibit ikan lele 4500 ekor		
		4. Pakan benih 20 Kg		
		5. Pakan Biasa Nomor 1 : 60 Kg		
		6. Pakan biasa nomor 2 = 220 Kg		

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan
		7. Pakan biasa nomor 3 (300 Kg)		
		8. Pelatihan budidaya ikan dalam kolam terpal		
		Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan		
		Menyiapkan bibit tanaman	Dinas Lingkungan Hidup	
		Budidaya ikan bagi karang taruna	Dinas Sosial	
		Membuat tempat pembibitan beserta rak dan benih tanaman (sayuran, toga dll)	Dinas Pertanian	
		Bantuan Bibit ayam Tapin Super 200 ekor beserta pakan.		
		Pembuatan Rumah Bibit,	Dinas Ketahanan Pangan	
		Pemberian bantuan bibit sayuran		
		Bantuan pupuk serta poli bag		
		Pembuatan dan pemberian tanaman hydroponik		
5	Anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis/ cacat bawaan	Pelaksanaan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)	Dinas Kesehatan	
		Program Stop BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)		

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan	
6	Selama 6 (enam) bulan terakhir, ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau <i>stunting</i>)	Pembinaan dan Pelaksanaan Posyandu Balita	Dinas Kesehatan		
		Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil			
		Pelaksanaan Kelas Ibu Balita			
		Pemberian PMT Penyuluhan dan PMT Pemulihan berbasis pangan lokal			
		Program Dasat (Dapur Sehat Atasi <i>Stunting</i>)	Dinas DPPKB dan Dinas Kesehatan		
		Penyuluhan 1000 HPK			
7	Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	Program renovasi/bedah rumah	Dinas Perkimtan		
		Selama 6 (enam) bulan terakhir, di dalam keluarga ada anak usia 7-17 tahun yang merokok	Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Dinas Kesehatan	
		Pembinaan rumah ber-PHBS			
9	Selama 1 (satu) tahun terakhir,	Pelayanan Pusling (Puskesmas Keliling)	Dinas Kesehatan		

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan
	terdapat anggota keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas			
		Kunjungan rumah oleh Bidan di Desa dan Kader kepada keluarga yang mengalami permasalahan Kesehatan		
10	Keluarga Memiliki rumah			Tidak ada keluarga yang tidak memiliki rumah
11	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah Suami dan/atau Istri mempunyai penghasilan tetap per bulan sebesar Rp 553.073,- per orang per bulan?	Program pelatihan kecantikan 16 orang	Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Pelatihan Kewirausahaan dengan sasaran pemuda usia 16 – 30 Tahun		
		Pelatihan Pembuatan Kain Sasirangan	Dinas Pendidikan	
		Sosialisasi pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan sasaran kelompok	Dinas Pariwisata	

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan
		masyarakat, dunia usaha dan aprat desa		
12	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah Suami dan/atau Istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar Rp 2.100 000?	Pelatihan budidaya ikan dalam kolam terpal	Dinas Peternakan	
		Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan		
		Program pelatihan kecantikan 16 orang	Dinas Tenaga Kerja	
		Pelatihan Kewirausahaan dengan sasaran pemuda usia 16 – 30 Tahun	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Pelatihan Industri Rumahan Perempuan	DP3A	
13	Selama 6 bulan terakhir Keluarga memiliki asuransi (BPJS)/lainnya	Memberikan jaminan sosial target dengan 150 orang (untuk melindungi risiko saat bekerja) melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan agunan maksimal sampai dengan 42 juta dan untuk anak sekolah jaminan sampai Pendidikan ke Perguruan Tinggi		
		Sosialisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan
		Pembuatan Kartu BPJS		
14	Keluarga menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak			Tidak ada anak yang menunggak pembayaran iuran atau keperluan pendidikan anak
15	Anak Putus Sekolah	INOVASI JAPIN TIPS KU HANDAL (JEMPUT ANAK TAPIN TIDAK PUTUS SEKOLAH KUALITAS HANDAL Pembentukan dan Pembinaan PAUD (NPWSN) Bantuan APE Luar	Dinas Pendidikan	
16	Selama 6 bulan terakhir apakah istri bekerja	Pelatihan industri rumahan Perempuan	Dinas Pendidikan	
17	Selama 6 (enam) bulan terakhir, suami dan istri Bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga	Pembentukan dan pembinaan Puspaga	DP3A	
		Sosialisasi layanan Puspaga kepada masyarakat		
18	Apakah Terjadi Kekerasan secara fisik dan/atau psikologis antar Suami dan istri	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak	DP3A	
		Pembentukan Menuju Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak		

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan
19	Apakah terjadi Kekerasan fisik dan/atau psikologis antar orang tua dan anak	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	DP3A	
		Sosialisasi pola asuh anak dan remaja		
		Simulasi pola asuh anak dan remaja		
20	Anggota keluarga yang terlibat dan atau berhadapan dengan hukum	Sosialisasi wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba		
		Sosialisasi politik cerdas, aman dan damai		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang lalu lintas	Dinas Perhubungan	
		Pembentukan dan pembinaan Satlinmas Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	
21	Selama 6 bulan terakhir anggota keluarga melakukan rekreasi bersama	Sosialisasi pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan sasaran kelompok masyarakat, dunia usaha dan aparat desa	Dinas Pariwisata	
		Sosialisasi pariwisata yang ada di		

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan
		Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan		
	Selama 6 bulan terakhir apakah ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak	Sosialisasi Pola Aduh Anak dan Remaja	DP3A dan TP. PKK	
		Pembinaan dan pendampingan orang tua terhadap anak untuk gemar membaca melalui penyediaan mobil keliling perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
23	Selama 6 bulan terakhir ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak	Sosialisasi Pola Aduh Anak dan Remaja	DP3A dan TP. PKK	
		Pembinaan dan pendampingan orang tua terhadap anak untuk gemar membaca melalui penyediaan mobil keliling perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Anak di bawah 18 tahun yang dinikahkan	Sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	DP3A	
		Pembentukan Forum Anak Desa		

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan
		Pelaksanaan orientasi PIK R		
		Pembentukan dan pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja		
25	Orang tua mengajarkan atau mencontohi kepada anak tentang Perilaku hidup bersih dan sehat	Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	
		Percontohan Rumah ber-PHBS		25 Buah
		Bantuan tempat sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyuluhan pengolahan sampah		
		Pembentukan bank sampah		
	Keluarga ikut dalam kegiatan sosial	Pembinaan Administrasi dan 10 Program Pokok PKK	TP. PKK DPMD SKPD terkait	
		Pembinaan fasilitasi PKK, Kelembagaan Desa, administrasi pemerintahan desa, dan peningkatan ekonomi desa melalui BUMDES.		
		Pembinaan kelompok-kelompok keagamaan		
		Pembentukan kelompok-kelompok		

No.	Indikator	Kegiatan	SKPD Pembina	Keterangan
27	Keluarga memberi perhatian pada Lansia	Pembentukan dan pembinaan Bina Keluarga Lansia	DPPKB	
		Pembinaan dan pelayanan Posyandu Lansia	Dinas Kesehatan	
		Senam lansia		
		Kegiatan untuk lansia tunggal, penyandang disabilitas, anak terlantar.	Dinas Sosial	
28	Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara rutin	Pembinaan grup yasinan, maulid	Dinas Pariwisata	
29	Selama 6 bulan terakhir apakah anak didampingi dalam menggunakan media sosial online	Sosialisasi pola asuh anak dan remaja terkait dengan penggunaan gadget dan media sosial yang cerdas	TP, PKK dan DP3A	
		Pembinaan Perpustakaan dan menyediakan pojok baca dengan meminjamkan buku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Sosialisasi gemar membaca berbasis inklusi		

Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Tabel 3.31 Jumlah Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Program Kampung Iklim

No.	Tahun	SK	Jumlah Kelurahan/Desa
1	2020	Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/169/KUM/2020	1 Desa
2	2022	Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/ 025 /KUM/2022	21 Desa/Kelurahan
3	2023	Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/ 025 /KUM/2023	135 (Seluruh Desa/Kelurahan)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, 2023

Dalam rangka kelancaran pengendalian perubahan iklim ditingkat tapak dengan melalui pelaporan dan pencatatan dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, perlu adanya Penetapan Desa dan Kelurahan Binaan Pelaksana Program Kampung Iklim di Kabupaten Tapin untuk kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kabupaten Tapin sendiri telah menetapkan beberapa desa dan kelurahan dalam pelaksanaan program kampung iklim. Pada Tabel 3.31 disajikan data jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan program kampung iklim di kabupaten Tapin.

Program Kampung Keluarga Berkualitas

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa di mana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu menetapkan Kampung Keluarga berkualitas di Kabupaten Tapin Sebagai wilayah pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas oleh Perangkat Daerah/instansi/*stakeholder* terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel 3.32 menyajikan data jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan program kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Tapin.

Tabel 3.32 Jumlah Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Program Kampung Keluarga Berkualitas

No.	Tahun	SK	Jumlah Kelurahan/Desa
1	2017	Keputusan Bupati Tapin	11 Desa

No.	Tahun	SK	Jumlah Kelurahan/Desa
		Nomor 188.45/144/KUM/2017	
2	2018	Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/136/KUM/2018	12 Desa
3	2022	Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/ 277 /KUM/2022	1 Desa
4	2023	Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/ 072 /KUM/2023	135 (Seluruh Desa/Kelurahan)

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, 2023

3.3.10. Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Keluarga (LPPKK)

Bina Keluarga

Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah proses pendidikan dan informasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam membentuk individu yang sehat, harmonis, dan berkualitas. Tabel 3.33, Tabel 3.34, dan Tabel 3.35 menyajikan data jumlah kelompok BKB yang ada di Kabupaten Tapin.

Tabel 3.33 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok pada Bina Keluarga Balita (BKB)

Kecamatan	Jumlah Kader BKB	Pelatihan Yang Pernah Diikuti				Jumlah Keluarga	
		BKB	Pencatatan dan Pelaporan	Lainnya	Belum Dilatih	Sasaran BKB	Anggota BKB
Binuang	92	50	0	0	16	1.979	85
Tapin Selatan	54	1	0	0	0	1.614	185
Tapin Tengah	94	5	0	0	19	1.658	500
Tapin Utara	94	3	0	0	0	1.247	79
Candi Laras Selatan	60	0	0	0	0	878	307
Candi Laras Utara	68	0	0	0	6	1.189	257
Bakarangan	60	1	0	0	1	858	160
Piani	58	10	0	0	7	426	133
Bungur	73	3	0	0	17	1.101	163
Lokpaikat	58	0	0	0	33	787	631
Salam Babaris	76	1	0	0	3	898	125
Hatungun	53	1	0	0	2	744	81
Total	840	75	0	0	104	13.379	2.706

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, 2023

Tabel 3.34 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok pada Bina Keluarga Remaja (BKR)

Kecamatan	Jumlah Kader BKR	Pelatihan Yang Pernah Diikuti		Jumlah Keluarga	
		BKR	Belum Dilatih	Sasaran BKR	Anggota BKR
Binuang	6	0	6	5.464	20
Tapin Selatan	12	3	9	3.631	110
Tapin Tengah	12	1	11	3.672	159
Tapin Utara	12	9	3	3.710	46
Candi Laras Selatan	3	0	3	2.080	32
Candi Laras Utara	9	0	9	3.045	74
Bakarangan	15	1	14	1.970	177
Piani	9	0	9	1.186	32
Bungur	9	0	9	2.502	40
Lokpaikat	15	2	13	1.904	358
Salam Babaris	9	0	9	2.135	17
Hatungun	9	2	7	1.865	30
Total	120	18	102	33.164	1.095

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, 2023

Tabel 3.35 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok pada Bina Keluarga Lansia (BKL)

Kecamatan	Jumlah Kader BKL	Demografi						Pelatihan Yang Pernah Diikuti				
		Pendidikan Terakhir (%)					Status Bekerja (%)		7 Dimensi Lansia Tangguh	Pendampingan PJP	Kelanjutan-Usia Lainnya	Belum Dilatih
		Tidak Sekolah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	PT/ Akademi	Bekerja	Tidak				
Binuang	23	4.3	4.3	13.0	8.7	8.7	39.1	0.0	1	0	0	22
Tapin Selatan	26	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.8	0.0	0	0	0	26
Tapin Tengah	56	0.0	0.0	14.3	0.0	1.8	14.3	0.0	6	0	0	50
Tapin Utara	29	0.0	0.0	6.9	6.9	0.0	13.8	0.0	1	0	0	28
Candi Laras Selatan	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	23
Candi Laras Utara	32	0.0	0.0	9.4	3.1	0.0	12.5	0.0	0	0	0	32
Bakarangan	24	0.0	0.0	8.3	4.2	0.0	12.5	0.0	0	0	0	24

Kecamatan	Jumlah Kader BKL	Demografi							Pelatihan Yang Pernah Diikuti			
		Pendidikan Terakhir (%)					Status Bekerja (%)		7 Dimensi Lansia Tangguh	Pendampingan PJP	Kelanjutan Usia Lainnya	Belum Dilatih
		Tidak Sekolah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	PT/ Akademi	Bekerja	Tidak				
Piani	23	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0	0	0	0	23
Bungur	30	0.0	0.0	3.3	6.7	0.0	6.7	0.0	0	0	0	30
Lokpaikat	35	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0	0	0	35
Salam Babaris	14	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	14
Hatungun	20	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	5.0	0.0	0	0	0	20
Total	335	0.36	0.36	6.11	4.38	1.12	10.06	0.00	8	0	0	327

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, 2023

PUSPAGA

PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan lembaga layanan yang berfungsi sebagai *one stop service*/layanan satu pintu bagi keluarga yang holistik, Integratif, Berbasis Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, sekaligus Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk melalui pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta memberikan rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, maka dipandang perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin sebagai bentuk pelayanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sebagai wujud kepedulian daerah dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga

Pelayanan PUSPAGA di Kabupaten Tapin meliputi 2 layanan, yaitu (1) layanan aktif yang terdiri dari (a) kunjungan lapangan, (b) sosialisasi, edukasi RW, Kelurahan/Desa, dan Kecamatan, serta (c) penyadaran kolektif dengan informasi komprehensif. Layanan kedua berupa (2) layanan pasif yang terdiri dari (a) kunjungan klien/tamu, (b) menerima kunjungan dan mencatat, (c) tenaga profesi memberikan layanan informasi dan konsultasi pengasuh, serta (d) memberikan rujukan (bila diperlukan). Tabel 3.36 menyajikan data jenis dan jumlah klien yang dilayani pada PUSPAGA di Kabupaten Tapin dari tahun ke tahun

Tabel 3.36 Layanan PUSPAGA

Jenis Layanan	2020	2021	2022	2023
Konseling Pranikah	145 pasangan	133 pasangan	127 pasangan	94 pasangan
Konseling Dispensasi	-	50 pasangan	71 pasangan	53 pasangan
Pemantauan Perkembangan Klien Dispensasi	-	-	3 pasangan	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, 2023

Pelayanan PUSPAGA tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang di hadapi. Hambatan tersebut berupa (1) klien tidak terbuka sepenuhnya kepada konselor atas persoalan yang dihadapi, (2) klien merasa tidak bebas untuk mengungkapkan persoalannya, (3) suasana di sekitar tempat pelayanan kurang nyaman/aman sehingga membuat klien enggan menyampaikan permasalahannya, dan (4) klien tidak percaya kepada konselor untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian atau penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya. Masalah psikologis keluarga dapat muncul dan berkembang dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar serta mudahnya mengakses secara bebas arus informasi yang berkaitan erat dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang. Dalam perkembangannya, masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, kekerasan dalam

rumah tangga, perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya. Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga memiliki sasaran berupa (1) keluarga secara umum dan dunia usaha sebagai sasaran sosialisasi untuk; mengembangkan sistem dukungan sosial, (2) keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis, dan (3) pihak-pihak yang membutuhkan informasi atas dasar kepedulian, niat, dan kepentingan untuk mengatasi masalah keluarga.

Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan LK3 dalam rangka upaya untuk meningkatkan semangat kerja, iklim berkompetisi, berprestasi, dan mengembangkan peran LK3, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin Nomor 048 Tahun 2024 tentang Penetapan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Tapin, ditetapkan pelayanan yang diberikan oleh LK3 Kabupaten Tapin berupa (1) memberikan Informasi, (2) menyediakan layanan konsultasi, (3) memberikan konseling, (4) memberikan layanan rujukan, dan (5) memberikan layanan penjangkauan. Pada Tabel 3.37 disajikan rekapitulasi pendampingan LK3 Ruhui Rahayu yang ada di Kabupaten Tapin.

Tabel 3.37 Rekapitulasi Pendampingan LK3 Ruhui Rahayu

No.	Klaster	Jumlah Klien dalam Lembaga	Jumlah Klien Luar Lembaga	Total Klien LK3	Uraian Kegiatan di LK3
1	Dewasa/ Keluarga	1	0	1	Pendampingan Penyelesaian Ketidaksiesuaian dokumen kependudukan atas nama Fadlan, diselesaikan dirujuk ke Dinas Kependudukan
2	Anak	1	0	1	Pendampingan anak berhadapan dengan hukum atas nama Muhammad Zainal, diselesaikan secara mediasi kekeluargaan
3	Dewasa/ Keluarga	1	0	1	Pendampingan keluarga miskin menderita lumpuh akibat kecelakaan atas nama Samiah, kasus selesai di rujuk ke BAZNAS dan Dinas Sosial, dibantu tongkat dan kursi roda.
4	Anak	1	0	1	Pendampingan anak terlantar ingin sekolah tidak memiliki

No.	Klaster	Jumlah Klien dalam Lembaga	Jumlah Klien Luar Lembaga	Total Klien LK3	Uraian Kegiatan di LK3
					seragam dll. atas nama Syarifulah, diselesaikan dan dirujuk ke BAZNAS Kab. Tapin.
5	Keluarga	1	0	1	Pendampingan keluarga miskin atas nama Muhammad, bantuan biaya ke rumah sakit. Di rujuk ke BAZNAS dan dibantu.
6	Anak & Keluarga	1	0	1	Pendampingan keluarga miskin, bantuan sembako atas nama Ijur, dibantu Dinas Sosial

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, 2023

3.4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Kebijakan teknis untuk memantau penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tapin Terdapat pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, dan dilakukan setiap triwulan, semester, dan tahunan. Kemudian diturunkan ke dalam kebijakan teknis untuk mengevaluasi penyelenggaraan PUG melalui Peraturan Inspektur Kabupaten Tapin Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, dilaksanakan setiap tahun (100% PD), belum dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi. Kebijakan teknis untuk mengawasi penyelenggaraan PUG; Peraturan Inspektur Kabupaten Tapin Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, terdapat rekomendasi PUG dalam perencanaan dan pelaksanaan tetapi belum pada penganggaran, belum dilakukan audit internal atas penyelenggaraan PUG.

3.4.1. Pemantauan Responsif Gender

Pemantauan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan isu strategis, visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran Pemantauan (*monitoring*) perencanaan yang responsif gender adalah dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) PD, dan

Rencana Kerja (RENJA) PD. Pemantauan pada RPJMD dan RKPD dilakukan tim yang dibentuk oleh Pokja PUG, sedangkan untuk Renstra dan Renja OPD dilakukan oleh *Focal Point* masing-masing PD.

Pemantauan Penganggaran Responsif Gender

Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sasaran dalam melakukan Pemantauan terhadap penganggaran responsif gender adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD. Pemantauan (*monitoring*) terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Pemantauan terhadap RKA dilakukan oleh *Focal Point* sedangkan Pemantauan (*monitoring*) terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam pemantauan yaitu: (1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan, (2) Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan Pemantauan (*monitoring*) oleh OPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi. Di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

a. Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, dokumen yang menjadi fokus Pemantauan (*monitoring*) anggaran responsif gender adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), *Term of Reference* (TOR), dan *Gender Budget Statement* (GBS).

Tabel 3.38 Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah penyusunan kegiatan/sub kegiatan sudah menggunakan analisis gender?			
		2. Apakah kegiatan/sub kegiatan tersedia dokumen GBS?			
		3. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan?			

		(KAK)/TOR?			
		4. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan RKA/TOR?			
		5. Apakah subkegiatan dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
		6. Apakah <i>input</i> (anggaran dan <i>input</i> lainnya) rasional yang ada pada TOR/RKA untuk mengurangi kesenjangan gender?			
		7. Apakah tujuan kegiatan dalam RKA/TOR berhubungan dengan hasil (<i>outcome</i> pada RKA)			
		8. Apakah tujuan kegiatan/subkegiatan secara jelas akan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki?			
		Jumlah jawaban (√)			

1. Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda.
2. Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender
3. Pada kolom 4, bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab "YA".
4. Pada kolom 5 Bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab "TIDAK".
5. Kolom 6 isi dengan tanggapan Anda jika Anda tidak bisa menjawab "YA" atau "TIDAK".

b. Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dokumen yang menjadi fokus Pemantauan (*monitoring*) adalah proses dan hasil yang dicapai melalui dokumen-dokumen pelaksanaan setiap kegiatan/sub kegiatan.

Tabel 3.39 Instrumen Pemantauan (*monitoring*) ARG Tahap Pelaksanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>input</i> RKA?			
		2. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>output</i> RKA?			
		3. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>outcome</i> RKA ?			
		4. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA ?			
		5. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan ?			

		6. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			
		Jumlah jawaban (√)			

c. Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, dokumen yang akan dimonitor adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dengan membandingkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah menerapkan anggaran responsif gender.

Tabel 3.40 Instrumen Pemantauan (*monitoring*) ARG Tahap Pertanggungjawaban

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan RKA dan DPA?			
		2. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan?			
		3. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan perempuan laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?			
		5. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi semula?			
		6. Apakah alokasi anggaran yang teredia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi.			
		Jumlah jawaban (√)			

3.4.2. Evaluasi terhadap Penganggaran Responsif Gender

Evaluasi adalah sebuah proses di mana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan

dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat- saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dengan kegunaan untuk menilai/menganalisis apakah keluaran (*output*), hasil (*outcomes*) ataupun dampak (*impact*) dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Pada tahap ini ada dua kegiatan yang harus dilakukan, yaitu (1) Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen monev perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, kemudian (2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah (1) pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender, (2) pendekatan *input* yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan *input* yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan (3) pendekatan *output* yaitu menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

Pada dasarnya instrumen Evaluasi terhadap Penganggaran Yang Responsif Gender yang digunakan sama dengan pemantauan (*monitoring*). Instrumen Evaluasi hanya menjumlahkan nilai yang ada dalam instrumen pemantauan. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini menitikberatkan pada dokumen kebijakan kegiatan/sub kegiatan, yaitu sejauh mana substansi kegiatan/sub kegiatan menerapkan prinsip penyusunan anggaran responsif gender. Evaluasi ini mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen pada Tabel 3.41. Adapun hasil evaluasi ARG dapat diklasifikasi sesuai Tabel 3.42.

Tabel 3.41 Instrumen Evaluasi Anggaran Responsif Gender

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Komponen Evaluasi	Total Jawaban	
			Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Perencanaan		
		Pelaksanaan		
		Pertanggungjawaban		
Total				

1. Kolom 1 isi dengan nama unit organisasi Anda.

2. Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender.
3. Kolom 4 isi dengan jumlah jawaban “YA” (total tanda jawaban (√) dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.
4. Kolom 5 isi dengan jumlah jawaban “TIDAK” dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.

Tabel 3.42 Klasifikasi Evaluasi

Nilai Variabel	Kriteria Penilaian
15 – 20	Responsif Gender
8 – 14	Kurang Responsif Gender
1 – 7	Tidak responsif Gender

3.5. Pelaporan

Kebijakan teknis untuk pelaporan atas penyelenggaraan PUG berdasarkan pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Laporan Penyelenggaraan PUG dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah terdapat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2022, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tapin Tahun Anggaran 2022.

3.6. Inovasi

Kabupaten Tapin telah menciptakan berbagai inovasi penyelenggaraan PUG untuk mendukung kesetaraan gender. Pada Tabel 3.43 disajikan inovasi-inovasi yang telah dilakukan.

Tabel 3.43 Inovasi Kabupaten Tapin terkait Penyelenggaraan PUG

No.	Nama Inovasi	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	AKSI SI JANTAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	APM	RSUD Datu Sanggul
3	AROBAT	RSUD Datu Sanggul
4	DOKTER CINTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	GEPPREK PEDES	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	GERCEP’S PANAS	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	JANJI SEHATI	Puskesmas Salam Babaris

No.	Nama Inovasi	Satuan Kerja Perangkat Daerah
8	JAPIN TIPS KU HANDAL	Dinas Pendidikan
9	MOJANG BASTARI	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Pompa Hidram	Kecamatan Tapin Selatan
11	POS CERIA	Puskesmas Tambaruntung
12	Si-Cekatan PBB-P2	Badan Pendapatan Daerah
13	Si-Pendekar PBB-P2	Badan Pendapatan Daerah
14	SIAGA	Kecamatan Binuang
15	SIKEPO SP2D	Badan Keuangan dan Aset Daerah
16	SITALAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	SUKA MAS YAN SETDA	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
18	PELANGI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	TERSAJI	Puskesmas Bakarangan

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini akan disajikan dan dikelompokkan berdasarkan indikator PUG. Adapun sistematika penyusunan rencana aksi daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
2. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Perencanaan Pembangunan;
3. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Penganggaran
4. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Politik
5. Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
6. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan
7. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Kesehatan
8. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Sosial
9. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Ekonomi
10. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga(LPLPKK)
11. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
12. Pelaporan dan Inovasi

Penyajian Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) sebagaimana di atas adalah untuk memudahkan bagi para pelaksana pembangunan dan para pemangku kewajiban di Kabupaten Tapin di dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengarusutamaan gender. Selain kepentingan perencanaan kegiatan, Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) ini dapat juga digunakan sebagai alat *monitoring* untuk mengukur serta menilai capaian-capaian pembangunan dari waktu ke waktu selama periode perencanaan PUG ini. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD- PUG) Kabupaten Tapin ini secara terperinci disajikan dalam bentuk matriks perencanaan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Advokasi Pokja PUG	Jumlah Pelaksanaan Advokasi	kali	1	1	1	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Terhadap PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Pelatihan Fasilitator PUG(Tim Driver)	Jumlah Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kegiatan Baru	4	4	4	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Terhadap PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Bimbingan Teknis Tim Focal Point	Jumlah Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kegiatan Baru	45	45	45	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Terhadap PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Monitoring dan Evaluasi RAD PUG	jumlah pelaksanaan kegiatan	kali	Kegiatan Baru	1	1	1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Penyusunan Buku data terpilah gender dan anak	Jumlah buku	buah	1	1	1	1	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam KelembagaanData di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Sosialisasi PUG	Jumlah desa	desa	Kegiatan Baru	12	24	36	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Terhadap PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Rapat Koordinasi Pokja PUG	Jumlah Pelaksanaan Rapat	kali	Kegiatan Baru	3	3	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Penetapan Keputusan Bupati tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak(DRPPA)	Jumlah Desa yang ditetapkan	Desa	Kegiatan Baru	4	12	24	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Penetapan Keputusan Bupati tentang Model Desa Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Desa yang ditetapkan	Desa	1	1	1	1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kelaurga tingkat daerah kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Model Desa Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Desa	Desa	1	1	1	1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kelaurga tingkat daerah kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Penyusunan SK TIM Pengawasan dan pembinaan KTR (sesuai kebijakan daerah)	Jumlah SK	Dokumen	Belum Ada	-	1	-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
Penyusunan Peraturan/ kebijakan terkait lembaga konsultasi keluarga (PUSPAGA, LK3, BKB, BKR dan PPKS)	Jumlah Peraturan/ Kebijakan	dokumen	Belum ada	-	1	-	Program Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

2. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Perencanaan Pembangunan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan mitra bidang Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen	Dokumen	8	8	8	8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan mitra bidang Sosial	Jumlah Dokumen	Dokumen	9	9	9	9	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan mitra bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen	Dokumen	10	10	10	10	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan mitra bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen	Dokumen	17	17	17	17	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

3. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Proses Penganggaran

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Bimbingan Teknis PUG melalui PPRG	Jumlah Pelaksanaan	kali	1	1	1	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Terhadap PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Monitoring dan Evaluasi PPRG	Jumlah Pelaksanaan	kali	Kegiatan Baru	1	1	1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

4. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Politik

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Pelatihan keadilan dan kesetaraan gender dibidang politik dan dunia usaha	Jumlah pelaksanaan	kali	1	1	1	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan perempuan bidang politik hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Sosialisasi Pendidikan Politik untuk penyandang disabilitas	Jumlah Disabilitas yang mengikuti Sosialisasi Pendidikan Politik	orang	30	30	30	30	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pendidikan politik untuk perempuan	Jumlah peserta	orang	100	100	100	100	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
								serta Pemantauan Situasi Politik		
Sosialisasi Pendidikan Politik untuk pemilih pemula	Jumlah peserta	orang	500	400	400	400	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sosialisasi Pendidikan Politik untuk anggota organisasi masyarakat	Jumlah peserta	orang	70	70	70	70	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
								serta Pemantauan Situasi Politik		
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta	orang	120	120	120	120	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah SKPD	SKPD	45	45	45	45	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5. Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Advokasi ke SKPD terkait upaya pembentukan kelembagaan jejaring	Jumlah Rakor	Kali	2	2	2	2	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Sosialisasi Anti kekerasan terhadap perempuan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	orang	150	270	300	300	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Pelatihan penanganan kasus terhadap perempuan	Jumlah orang yang dilatih	orang	24	2	15	20	Perlindungan Perempuan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Kajian pemetaan kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Laporan	Dokumen	1	1	1	1	Perlindungan Perempuan	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Pemberian layanan bagi perempuan Korban kekerasan	Persentase korban yang terlayani	persen	100	100	100	100	Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Pembuatan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Paket KIE	Paket	1	1	1	1	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Rapat koordinasi Satuan Tugas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia(PMI) Non Prosedural dan penanganan TPPO	Jumlah Rakor	Kali	1	1	1	1	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Pembentukan, Pelatihan dan Pembinaan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA)	Jumlah Pelaksanaan	kali	1	1	2	4	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi/Gerakan/Kelompok Perempuan	Jumlah Pengurus	Orang	0	0	50	50	Perlindungan Perempuan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

6. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Pelatihan Parenting education bagi jejaring puspaga	jumlah pelaksanaan	kali	1	1	1	1	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Sekolah Ayah Bunda dalam rangka menurunkan stunting	Jumlah peserta	orang	60	60	75	100	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Advokasi kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Pelatihan Guru Pendamping khusus	Jumlah Kegiatan	Kali	Kegiatan Baru	1	1	1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
Dukungan sarpras sekolah inklusi	Jumlah Sekolah/Lembaga						Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
Bantuan Biaya Personel Untuk siswa miskin tingkat SD	Jumlah Peserta Didik	orang	100	100	100	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
Bantuan Perlengkapan Siswa Untuk Siswa Miskin Tingkat SD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	Unit	376	376	376	376	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan
Bantuan Biaya Personel Untuk	Jumlah Peserta Didik	orang	50	50	50	50	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
siswa miskin tingkat PAUD										
Bantuan Perlengkapan Siswa Untuk Siswa Miskin Tingkat PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	Unit	1	1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan
Bantuan Biaya Personel Untuk siswa miskin tingkat SMP	Jumlah Peserta Didik	orang	50	50	50	50	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
Bantuan Perlengkapan Siswa Untuk Siswa Miskin Tingkat SMP	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan

7. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Kesehatan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Puskesmas ramah anak	Jumlah Puskesmas	Buah	13	13	13	13	Program Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA Dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak dalam rangka menurunkan stunting	Jumlah Peserta	orang	1500	1500	2500	5000	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Advokasi kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Kelas Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil	Orang	3390	3448	0	0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
Kemitraan Dukun Kampung dengan bidan	Jumlah Dukun Kampung	orang	77	77	85	91	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
Peningkatan pelayanan persalinan Poskesdes, Klinik, Bidan Praktek mandiri dan Rumah sakit	Jumlah Bidan	orang	3237	3431	3407	3407	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
Cetak Buku KIA	Jumlah buku KAI	Buah	3390	3424	3424	3424	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
Evaluasi Capaian imunisasi dasar lengkap	Jumlah Kegiatan	Kali	4	4	4	4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
Sweeping Imunisasi	Jumlah Bayi	orang	2963	3181	0	0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Pelatihan USG dokter di Puskesmas	Jumlah Kegiatan	Kali	1	1	1	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
Penyuluhan dan Konseling untuk mengatasi masalah tatalaksana gizi	Persentase Balita yang mendapat tatalaksana Gizi Buruk	%	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Pemberian Vitamin A	Persentase Bayi dan Balita yang mendapat Vitamin A	%	90	90	95	95	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Orientasi Kader dalam Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita	Jumlah Kegiatan	kali	1	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Surveilans Gizi	Jumlah Kegiatan	kali	4	4	4	4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Publikasi Data Stunting	Jumlah Kegiatan	kali	0	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Penyediaan Makanan Tambahan bahan pangan lokal	Jumlah Sasaran yang di berikan	orang	142	1216	1350	1350	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
kampung kb	jumlah desa	desa	25	25	25	25	Program pembinaan keluarga berencana(KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan BerKB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Penyuluhan ASI Eksklusif	Jumlah Puskesmas yg melaksanakan	Puskesmas	Kegiatan Baru	0	13	13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	Jumlah Kegiatan	kali	Kegiatan Baru	0	1	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Penyediaan alat peraga penyuluhan MP-ASI	Jumlah Paket Alat	Buah	Kegiatan Baru	0	15	15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Advokasi kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak	Jumlah Puskesmas	Puskesmas	13	13	13	13	Program Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA Dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pelatihan SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak	Jumlah Puskesmas	Puskesmas	13	13	13	13	Program Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA Dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Evaluasi dan Monitoring Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Puskesmas	Puskesmas	13	13	13	13	Program Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA Dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pendataan 5 Pilar STBM	Jumlah KK	KK	0	6000	0	0	Program Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA Dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan pemicians 5 pilar STBM dan Percepatan Verifikasi desa ODF	Jumlah Kecamatan	Kecamatan	12	0	12	12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan Kualitas Air Minum Rumah Tangga	Jumlah Rumah tangga	Rumah Tangga		150			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Pengujian Sampel Air Minum	Jumlah Rumah tangga	Rumah Tangga	0	0	65	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
Pelatihan Fasilitator STBM	Jumlah Sanitarian	orang	0	0	25	25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
Verifikasi Lapangan Desa ODF	Jumlah Desa	desa	0	0	65	70	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
Pembangunan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Liter/Detik	Liter/detik	0	50	50	50	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	SR	1254	1000	500	500	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Peningkatan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Liter/Detik	Liter/detik	500	200	200	200	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Peningkatan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	SR	10	10	10	30	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Perluasan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah	SR	1000	100	100	100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	1000	200	100	100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	SR	10	10	10	30	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah	SR	200	100	100	400	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan/Pe nyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	0	2	1	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit	Unit	0	1	1	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Unit	Unit	1	1	1	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	0	5	5	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah M2/Hari	M2/Hari	1	1	1	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sosialisasi kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan instansi	Jumlah kegiatan	Kali	130	130	130	130	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
Cetak KIE Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah alat KIE	Buah	300	500	600	700	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Sosialisasi dan Penyuluhan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	jumlah peserta	orang	300	300	300	300	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Promosi Kesehatan	jumlah media	media	8	8	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Datu Sanggul
Pengadaan tenaga keamanan wanita	Persentase tenaga keamanan wanita	Persen	0	25	25	25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Datu Sanggul
Pengadaan tenaga kebersihan wanita	Persentase tenaga kebersihan wanita	Persen	10	40	40	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Datu Sanggul
Sosialisasi pentingnya makan ikan	Jumlah anak	orang	200	200	200	200	Program pengolahan dan pemasaran hasil ikan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam satu daerah kabupaten/kota	Dinas Perikanan
Gerakan makan ikan	Jumlah Anak	Orang	100	100	100	100	Program pengolahan dan pemasaran hasil ikan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam satu daerah kabupaten/kota	Dinas Perikanan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Penyuluhan Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk kader pangan	jumlah kader	orang	24	24	24	24	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
Lomba Festival Pangan Lokal Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk kader Tim Penggerak PKK Kecamatan	Jumlah Kader	orang	24	24	24	24	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) goes to school	jumlah siswa	siswa	kegiatan baru	0	500	500	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
promosi dan konseling KB pasca Persalinan	jumlah peserta	orang	386	386	386	386	Program pembinaan keluarga berencana	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	promosi dan konseling KB pasca persalinan	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah peserta	orang	450	450	500	600	Program pembinaan keluarga berencana	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
								KB di daerah kabupaten/kota		
Sosialisasi KB Pasca persalinan dan pasca keguguran kepada bidan	jumlah peserta	orang	70	0	70	70	Program pembinaan keluarga berencana	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Pembinaan Kader Posyandu Balita	Jumlah kader	orang	223	223	223	223	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakatnya Pelaku Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKKPosyandu,LPM,Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa
Pembinaan Kader Posyandu Lansia	Jumlah kader	orang	Kegiatan Baru	0	117	117	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakatnya Pelaku Hukum Adat yang sama	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKKPosyandu,LPM,Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
								dalam daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi Pokjandal Posyandu kabupaten	Jumlah Pelaksanaan	kali	2	2	2	2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakatnya Pelaku Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKKPosyandu,LPM,Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa
Pembinaan kader PKK Kecamatan	Jumlah kader	orang	228	228	228	228	Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakatnya Pelaku Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKKPosyandu,LPM,Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Jambore Kader PKK	Jumlah pelaksanaan	kali	1	1	1	1	Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lem aga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakatnya Pelaku Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKKPosyandu,LPM,Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa
Lomba Administrasi PKK Desa	Jumlah pelaksanaan	kali	1	1	1	1	Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lem aga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakatnya Pelaku Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKKPosyandu,LPM,Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa
Kampung Iklim	Jumlah desa proklamasi	desa	Kegiatan Baru	58	68	78	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup

8. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Sosial

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Penyediaan Permakanan Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	179	150	150	150	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Pemakanan	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	115	15	15	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	Orang	15	6	6	6	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	Kabupaten/Kota									
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	115	15	15	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	115	15	15	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Penyediaan Permakanan Lanjut Usia Miskin di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang	Orang	348	415	415	415	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Pemakanan	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang Lanjut Usia Miskin di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang	Orang	100	60	60	60	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
Penyediaan Alat Bantu Lanjut Usia Miskin di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang	Orang	10	10	10	10	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Lanjut Usia Miskin di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang	Orang	15	30	30	30	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Miskin	Jumlah Orang	Orang	30	15	15	15	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Pemberian Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Waktu Pelaksanaan Pelayanan	Bulan	12	12	12	12	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Trauma Mental, Spiritual dan Sosial	Waktu Pelaksanaan Pelayanan	Bulan	12	12	12	12	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
Penyediaan Permakanan Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang	Orang	3	3	3	3	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Pemakanan	Dinas Sosial
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Disabilitas yang mendapatkan perbaikan rumah	Orang					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Disabilitas yang mendapatkan perbaikan rumah	Orang					Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

9. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Ekonomi

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Pelatihan Industri rumahan perempuan	Jumlah Pelaksanaan	kali	1	1	1	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan perempuan bidang politik hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Pameran Hasil Karya Perempuan	Jumlah Pelaksanaan	kali	1	1	1	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Pelatihan menjahit	Jumlah peserta	orang	64	64	64	64	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
Pelatihan Kecantikan	Jumlah peserta	orang	16	16	16	16	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
Pelatihan membuat kue	Jumlah peserta	orang	16	16	16	16	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
Pelatihan Komputer	Jumlah peserta	orang	32	32	32	32	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah	Jumlah peserta	orang	Kegiatan baru	600	600	600	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Tenaga Kerja

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
								Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah	Jumlah peserta	orang	Kegiatan baru	5084	5084	5084	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Tenaga Kerja
Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi marbot masjid/ pengajar TPA	Jumlah peserta	orang	Kegiatan baru	949	1000	1000	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Tenaga Kerja
Bantuan Benih Sayuran dan Pembinaan kepada kelompok wanita tani	Jumlah kwt	kelompok	2	2	2	2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal untuk kader pangan	Jumlah kader	orang	24	24	24	24	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Pasar murah untuk warga umum dan miskin	jumlah keluarga	Keluarga	3000	3000	3000	3000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
Usaha Ekonomi Produktif(UEP) bagi karangtaruna	jumlah orang	orang	60	131	60	60	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial
Bimbingan Teknis Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Jumlah kwt	Kelompok wanita tani	5	8	4	4	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	pengawasan penggunaan sarana pertanian	pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi	Dinas Pertanian
Pembinaan pelaku usaha kesejahteraan hewan	Jumlah pelaku usaha	orang	8	8	8	8	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Dinas Pertanian
Gerakan minum susu dan makan telur	Jumlah Anak	Orang	1200	1200	1200	1200	Program penyediaan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Dinas Pertanian
Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Jumlah kelompok	Kelompok tani	1298	1298	1298	1298	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Dinas Pertanian
Pelatihan pengolahan hasil perikanan	Jumlah orang	orang	10	20	20	20	Program pengolahan dan pemasaran hasil ikan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Dinas Perikanan

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Lomba masak Ikan tingkat provinsi dan kabupaten	Jumlah orang	orang	30	30	30	30	Program pengolahan dan pemasaran hasil ikan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam satu daerah kabupaten/kota	Dinas Perikanan
Sosialisasi kewirausahaan	Pelaku usaha	Orang	50	50	50	50	Program pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Dinas Perindustrian
Bimbingan pengelolaan koperasi modern	Jumlah orang	orang	45	45	45	45	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas serta kompetensi sdm koperasi	Dinas Perindustrian
Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perisinan berusaha melalui sistem perixinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	izin	1000	1500	1500	1500	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perisinan Berusaha Melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tindak Lanjut Pengaduan terhadap pelayanan perizinan	Jumlah aduan	aduan	10	10	10	10	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha	Pelaku usaha	100	100	120	140	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10. Implementasi Responsifitas Gender pada Fasilitas Umum

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Fasilitas Parkir Khusus Untuk Wanita	Jumlah Fasilitas	Buah	1	1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Datu Sanggul
Standarisasi Ruang Laktasi	Jumlah ruang	buah	1	1	1	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Datu Sanggul
Pengadaan Sarana Disabilitas	Jumlah paket	paket	Kegiatan Baru	0	0	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Datu Sanggul
Sosialisasi penyediaan Fasilitas Ruang Laktasi di instansi	Jumlah Instansi	instansi	Kegiatan Baru	0	1	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan

Evaluasi dan Monitoring Ruang Laktsi	Jumlah Kegiatan	kali	Kegiatan Baru	0	1	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
--------------------------------------	-----------------	------	---------------	---	---	---	---	--	---	-----------------

11. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga(LPLPKK)

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Sosialisasi Puspaga	Jumlah Pelaksanaan	kali	1	1	1	1	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pelatihan parenting education bagi jejaring puspaga	Jumlah Pelaksanaan	kali	1	1	1	1	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Optimalisasi Pelayanan Puspaga	Jumlah layanan	layanan	1	1	1	1	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bimtek Pengurus LK3	Jumlah peserta	orang	11	11	11	11	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinas Sosial
Layanan Kosultasi Keluarga di LK3	Waktu Pelyanan	Bulan	12	12	12	12	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinas Sosial

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Pembuatan KIE LK3 (Brosur)	Jumlah	Lembar	100	135	200	250	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinas Sosial
Rapat koordinasi TIM LK3	Jumlah Kegiatan	Kali	2	2	2	2	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinas Sosial
Pembinaan Kader BKB terkait pola asuh orang tua	Jumlah Kader	orang	25	30	30	30	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Orientasi/Pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Pembinaan Kader BKR terkait Kesehatan Produksi bagi Remaja	Jumlah Kader	orang	25	30	30	30	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Orientasi/Pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Pembuatan KIE BKB (BKB Kit)	Jumlah Paket BKB KIT	Paket	30	25	10	30	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Pembinaan Kader BKL terkait kesehatan lansia	Jumlah Kader	orang	25	30	30	30	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten	jumlah peserta	orang	150	150	150	150	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Pemilihan duta Generasi Berencana(genre)	Jumlah peserta	orang	250	0	250	250	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Hari Kesatuan Gerak PKK	jumlah peserta	orang	200	200	200	200	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

12. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Monitoring dan Evaluasi RAD PUG	jumlah pelaksanaan kegiatan	kali	Kegiatan Baru	1	1	1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Monitoring dan Evaluasi PPRG	Jumlah Pelaksanaan	kali	Kegiatan Baru	1	1	1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

13. Pelaporan dan Inovasi

RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2023	TARGET PENCAPAIAN			NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Penyusunan Laporan PUG	Jumlah Laporan	laporan	Kegiatan Baru	1	1	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah sebuah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek, yaitu peran, akses, manfaat, dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Tapin memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (baik laki-laki atau perempuan) untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses seluruh hasil kegiatan pembangunan daerah melalui konsep pengarusutamaan gender (PUG) yang menjamin kesetaraan dan kesamaan hak seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melakukan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang Pembangunan di Daerah dan mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 diharapkan dapat memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender di mana terdapat perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender sehingga terwujudnya kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Dokumen RAD PUG ini dalam perjalanannya harus terus dipantau dan dapat ditinjau ulang untuk menyesuaikan dan beradaptasi secara aktif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta dinamika pembangunan daerah dan nasional. Sebagai harapan bersama, semoga RAD PUG dapat benar-benar menjadi acuan dan arahan serta memberi kontribusi yang positif untuk mewujudkan Keadilan Gender bagi

perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, dan hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, akses perbankan, dan lain-lain).